



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
OLEH KOPERASI WANITA WETAN KANTOR KELURAHAN JEMBER
LOR**

**THE EFFECTIVENESS IMPLEMENTATION OF THE MICRO
ENTERPRISES EMPOWERMENT BY WOMEN'S COOPERATIVES OF
WETAN KANTOR JEMBER LOR VILLAGE**

SKRIPSI

Oleh

Nofita Indah Sriwidayanti

NIM 080910291008

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2015



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
OLEH KOPERASI WANITA WETAN KANTOR KELURAHAN JEMBER
LOR**

***THE EFFECTIVENESS IMPLEMENTATION OF THE MICRO
ENTERPRISES EMPOWERMENT BY WOMEN'S COOPERATIVES OF
WETAN KANTOR JEMBER LOR VILLAGE***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Program Sarjana

Oleh

Nofita Indah Sriwidayanti

NIM 080910291008

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2015

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang saya akhirnya dapat merampungkan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah berusaha keras mengantarkan saya menjadi manusia yang lebih berarti:

1. Kedua orang tuaku tercinta tumini dan yudhandoko terima kasih atas segala jerih payah dan kesabarannya atas segala hal yang tidak dapat terbalas dan terungkapkan dengan bahasa apapun.
2. Kepada nenek saya yang sangat saya sanyangi Hj.Siti Khotidjah yang tak pernah lelah mendo'akan dan memberi kasih sayang serta pengorbananya
3. Keluarga besar saya, Adik-adik saya tercinta sevina deni dan herlinda rani saputri terima kasih atas segala support,dan doanya.
4. Seluruh guru, teman, sahabat yang telah turut serta menjadi bagian penting dari perjalanan hidup ini semoga setiap kebersamaa itu dapat memberikan makna terdalam di hati ini.
5. Almamater tercinta Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTTO

Belajar dari hari kemaren, hidup untuk hari ini, berusaha untuk hari esok.
Hal terpenting adalah tidak berhenti bertanya.
(Albert Einstein)*

Kemajuan bukanlah karena memperbaiki apa yang telah kau lakukan, tapi
mencapai apa yang belum kau lakukan.
(Kahlil Gibran)**

*Mandjani, Esther S, *Seri Penemuan ilmiah Albert Einstein dan relativitas, Cet. I, Quality Press, Jakarta, 1998***Gibran, Kahlil, *Mirror of The Soul, terjemahan Fauzi Absal, Tarawang Press, Yogyakarta, 2002*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofita Indah Sriwidayanti

NIM : 080910291008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor ” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya juplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2015

Yang menyatakan,

Sriwidayanti

Nofita Indah

NIM 080910291008

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
OLEH KOPERASI WANITA WETAN KANTOR KELURAHAN JEMBER
LOR**

*(The Effectiveness Implementation Of The Micro Enterprises Empowerment By
Women's Cooperatives Of Wetan Kantor Jember Lor Village)*

Oleh

Nofita Indah Sriwidayanti

NIM 080910291008

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Anwar, M.Si

Dosen Pembimbing Pendamping : Dra. Inti Wasiati, MM

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor” telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Senin, 07 September 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Sutomo, M.Si

Dr. Anwar, M.Si

NIP. 196503121991031003

NIP. 196306061988021001

Anggota,

1. Dra. Inti Wasiati, MM
NIP. 195307311980022001

()

2. Drs. Boedijono, M.Si
NIP. 196103311989021001

()

Mengesahkan

Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A

NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Efektivitas Pemberdayaan Usaha Micro Oleh Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor ; Nofita Indah Sriwidayanti, 080910291008; 2015: 80 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Tidak hanya menyangkut masalah ekonomi saja, akan tetapi juga terkait dengan masalah politik, sosial, hingga budaya. Begitu kompleksnya masalah yang dihadapi masyarakat miskin tersebut sehingga tidak memungkinkan mereka untuk berupaya sendiri. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran adalah meningkatkan pembangunan ekonomi pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan melalui koperasi wanita Wetan Kantor merupakan salah satu upaya meningkatkan pendapatan pelaku usaha melalui modal pinjaman yang diberikan oleh pihak koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor .

Penelitian merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,dll [sic]., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi penelitian di Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember. Informan penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha mikro, sementara sampel yang diambil berdasarkan jumlah jenis unit usaha yang berjumlah 10 jenis usaha. Unit analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan usaha mikro dapat dilihat dari beberapa aspek meliputi kapasitas semakin meningkat dibandingkan dengan sebelum mendapatkan bantuan pinjaman modal dari koperasi. Peningkatan jumlah pendapatan pelaku usaha mikro dan kemampuan menabung pada koperasi. Peningkatan jenis usaha serta jumlah produksi yang dilakukan. Hasil dari efektivitas pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro pada sektor ekonomi tersebut pada akhirnya akan memberikan dampak positif pada taraf hidup dan tingkat kesejahteraan anggota koperasi. Berdasarkan fakta-fakta

tersebut jelas terlihat bahwa efektivitas pelaksanaan untuk usaha mikro sangatlah berdaya, artinya usaha mikro dapat diberdayakan melalui akses pemodalan oleh koperasi.



PRAKATA

Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor . Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Edy Wahyudi, S. Sos, MM, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M. Si, selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Anwar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing utama yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Dra. Inti Wasiati, MM, selaku Dosen Pembimbing pendamping dan selaku DPA yang telah banyak pengarahan dalam skripsi ini;
6. Bapak Dr. Sutomo, M.Si serta Bapak Drs.Boedijono, M.Si selaku dosen penguji terimakasih atas saran dan kritiknya;
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Bapak faruk dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jember yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan data dan informasi kepada penulis sehingga penulis berjalan lancar;
9. Bapak Rohim, Ibu sholeha, semua pengurus Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor dan sepuluh jenis pemilik usaha mikro, telah memberikan untuk melakukan penelitian ini;
10. Sahabat-sahabat terkasih saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih sudah menjadikan teman sekaligus keluarga selama berada di jember;

11. Anak-Anak khususnya AN 2008 perjuangan dan perjalanan kita bersama tidak akan pernah terlupakan
12. Semua pihak yang turut serta menjadi bagian penting dari terselesaikannya skripsi ini.

Peneliti telah berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa cacat. Namun peneliti sadar bahwa kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata, maka oleh karena itu peneliti mengharapkan tegur sapa semua pihak dalam bentuk kritik dan saran agar skripsi dapat tersaji lebih baik lagi. Akhir peneliti berharap agar skripsi ini tidak hanya menjadi prasyarat gelar Sarjana melainkan juga dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Jember, 26 Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep.....	13
2.2 Konsep Pembangunan	14
2.3 Konsep Kemiskinan	14
2.3.1 Dimensi Kemiskinan.....	16
2.3.2 Kriteria Kemiskinan	16
2.4 Konsep Efektivitas	18
2.4.1 Pengertian Efektivitas	18
2.4.2 Kriteria Mengenai Pencapaian Tujuan Efektivitas	18

2.5 Konsep Pemberdayaan	19
2.5.1 Pengertian Pemberdayaan	19
2.5.2 Pemberdayaan Perempuan	22
2.5.3 Indikator Keberdayaan	23
2.5.4 Model-Model Pemberdayaan	25
2.6 Konsep Usaha Mikro	29
2.6.1 Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro	29
2.6.2 Perempuan Sebagai Pemilik Usaha Mikro.....	31
2.7 Konsep pemberdayaan usaha mikro melalui koperasi wanita	32

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Fokus Penelitian	36
3.2 Tipe Penelitian.....	37
3.3 Penentuan Lokasi Penelitian.....	37
3.4 Teknik Penentuan Informasi	37
3.5 Teknik Pengumpulan data	39
3.6 Metode Analisis Data	40
3.7 Keabsahan Data	41

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Daerah Penelitian	43
4.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Jember Lor	43
4.1.2 Keadaan Penduduk	43
4.1.3 Sarana Prasarana	45
4.2 Gambaran Umum Koperasi Wanita Wetan Kantor	46
4.2.1 Visi, Misi dan Tujuan	47
4.2.1 Standar Status Keanggotaan.....	47
4.2.2 Standar Perlakuan kepada Anggota Baru.....	47
4.2.3 Standar Pengelolaan Organisasi.....	48
4.2.4 Standar Penghimpunan Dana	49

4.2.5 Standar Persyaratan Calon Peminjam	53
4.2.6 Standar Operasional Pembagian SHU	55
4.3 Hasil Dari Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor ...	56
4.3.1 Segmentasi Peminjaman	57
4.3.2 Tatacara Permohonan Pinjaman	61
4.3.3 Limit Pinjaman	63
4.3.4 Biaya Pinjaman	64
4.3.5 Analisis Pinjaman	65
4.3.6 Pembinaan Terhadap Pinjaman	68
4.3.7 Dokumentasi	70
4.3.8 Pelunasan Pinjaman	72
4.4 Tabel Hasil Pembahasan	76
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perolehan Pendapatan Usaha Koperasi Wanita Wetan Kantor Tiga Tahun Terakhir.....	7
Tabel 1.2 Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Wanita Wetan Kantor Tiga Tahun Terakhir	7
Tabel 1.3 Jenis-Jenis Usaha Pelaku usaha mikro Koperasi Wetan Kantor Berserta Jumlah Anggota	8
Tabel 1.4	Peningkatan Pendap
Tabel 2.1 Indikator keberdayaan.....	23
Tabel 4.1 jumlah penduduk Jember Lor	43
Tabel 4.2 kesejahteraan penduduk	43
Tabel 4.3 Status Mata pencaharian penduduk jember lor	44
Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Kelurahan Jember Lor.....	44
Tabel 4.5 Susunan pengurus anggota koperasi wanita wetan kantor	52
Tabel 4.6 Modal Awal yang Diterima Kelompok Anggota Kopwan Wetan Kantor	59

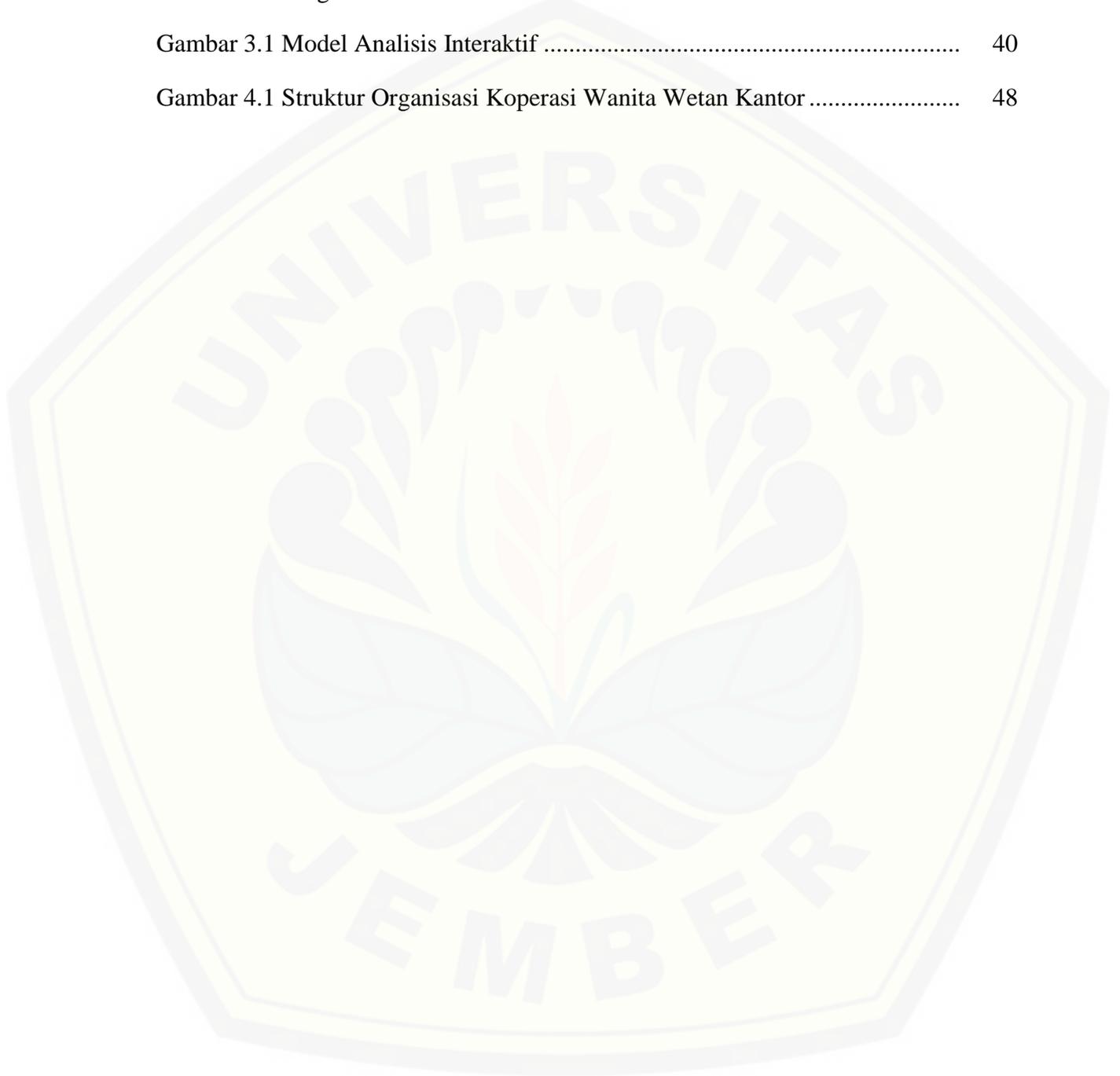
Tabel 4.7 Angsuran dan Simpanan Sukarela Koperasi Wanita Wetan Kantor 74

Tebel 4.8 Hasil Pembahasan 75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lingkaran setan kemiskinan.....	28
Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Wanita Wetan Kantor	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampira 1		Pedoman
Lampiran 2	Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri Menteri Negara Dalam Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Gubernur Bank Indonesia	
Lampiran 3	Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Tentang Pembentukan Koperasi Wanita Tingkat Kabupaten atau kota Tahun 2009	
Lampiran 4	Surat Keputusan Bupati Tentang Alokasi Dana Kelompok Wanita Desa atau Kelurahan Penerimaan Belanja Hibah Bantuan Modal Kabupaten Jember Tahun 2009	
Lampiran 5	Petunjuk Teknis Tentang Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Melalui Koperasi Wanita	
Lampiran 6	Akta Pendirian Koperasi Wanita Wetan Kantor	
Lampiran 7	Tentang SOP (Standart Operasional Manajemen) Koperasi Wanita Wetan Kantor	
Lampiran 8	Bentuk Formulir Administrasi Koperasi Wanita Wetan Kantor	
Lampiran 9	Daftar Aggota Koperasi Wanita Wetan Kantor	
Lampira 10	Daftar Pembayaran Rutin ataupun Nungak Anggota	
Lampira 11	Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember	
Lampiran 12	Surat Izin Penelitian Dari Lembaga Penelitian Universitas Jember	
Lampiran 13	Surat Izin Dari Kantor Badan Kesatuan Politik Dan Limas Kabupaten Jember	
Lampiran 14	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Jember	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Tidak hanya menyangkut masalah ekonomi saja, akan tetapi juga terkait dengan masalah politik, sosial, hingga budaya. Begitu kompleksnya masalah yang dihadapi masyarakat miskin tersebut sehingga tidak memungkinkan mereka untuk berupaya sendiri. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang layak dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum tersebut antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, air bersih dan sumber daya alam, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. (Bappenas, 2004, www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/7314/1200/. (Diakses pada tanggal 05 september 2014))

Menurut laporan statistik (BPS, 2011) tentang tingkat kemiskinan di Indonesia, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada bulan maret 2006 sebanyak 39,90 juta jiwa (17,75%). Dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2005, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 3,95 juta jiwa. Pada bulan Maret 2011, selama 5 tahun terjadi

penurunan angka kemiskinan secara nasional. Penduduk miskin turun sebanyak 9,88 juta dari 39,90 juta orang (17,75%) menjadi 30,02 juta jiwa (12,49 %) dari jumlah penduduk (<http://www.bps.go.id/> Diakses pada tanggal 05 september 2014)

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2013 lalu jumlah penduduk miskin di Jawa Timur 4,89 juta atau 12,73% dari total penduduk. Sedangkan tahun 2014 penduduk miskin di provinsi dengan 38 kabupaten/kota tersebut 4,78 juta atau 12,43% dari total penduduk. Bila digolongkan berdasar lokasi, persebaran kemiskinan di daerah perkotaan sebesar 8,35% dan pedesaan 16,13% dari jumlah penduduk. Di kabupaten Jember pada tahun 2010 dinyatakan sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan nomor 1 di provinsi Jawa Timur berdasarkan data di badan pusat statistik kabupaten Jember. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember, mencapai 237.700 kepala keluarga. Namun jika diakumulasikan dengan jumlah penduduknya, kabupaten Jember tidak menempati kabupaten termiskin di Jawa Timur. Pada tahun 2013, Kabupaten Jember masih masuk dalam 10 kabupaten kabupaten paling banyak penyumbang angka kemiskinan. Penerima Raskin di Jember mencapai 192 ribu rumah tangga sasaran. Sementara jumlah penerima program Jamkesmas sebanyak 930 ribu jiwa (BPS, 2014, <http://kabar24.bisnis.com/> Diakses pada tanggal 05 september 2014)

Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai strategi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung diwujudkan dalam bentuk bantuan dana stimulan sebagai modal usaha kegiatan ekonomi produktif, bantuan sosial (seperti program subsidi langsung tunai, beras miskin, dll); secara tidak langsung melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan dan perlindungan sosial. Upaya penanggulangan kemiskinan perlu diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (*public awareness*). Apalagi satu hal yang seringkali terlupakan adalah dimensi feminis dan ketimpangan gender. Dimanapun, kemiskinan

selalu menampilkan wajah perempuan di depan. Banyak peneliti kontemporer mengungkapkan, dalam sebuah keluarga miskin, perempuan senantiasa sebagai katup penyelamat bagi perekonomian keluarga. Setidaknya ada empat peran perempuan miskin dalam keluarga. Pertama, sebagai pengelola keuangan keluarga; Kedua, sebagai penanggung jawab seluruh pekerjaan domestik; Ketiga, sebagai pencari nafkah keluarga; Keempat, sebagai salah satu simpul jaringan sosial yang penting dalam hal transfer sosial, khususnya pada masa-masa kritis dan krisis (Basuki dan Presetyo, 2007: 10-11)

Kaum perempuan merupakan salah satu segmen penduduk dalam pembangunan yang memiliki jumlah yang seimbang dengan laki-laki. Hal tersebut merupakan potensi atau modal besar yang dimiliki perempuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau posisinya sejajar dengan laki-laki. Konsep pembangunan kemampuan peranan perempuan yang dipergunakan berkembang menjadi pemberdayaan perempuan yang berarti meningkatkan kualitas dan peran perempuan pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan akslerasi proses pembangunan.

Diakui selama ini ada anggapan bahwa kualitas perempuan dalam pembangunan masih sangat rendah, yang menyebabkan peran kaum perempuan tertinggal dalam segala hal. Maka untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan gender ke dalam arus pembangunan dengan cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan dan menghilangkan faktor kendala yang dihadapi perempuan dalam pembangunan dengan melakukan kegiatan analisis dan evaluasi (1) sejauhmana perempuan terlibat dalam program-program pembangunan (2) sejauhmana kualitas tenaga kerja perempuan (3) hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi perempuan dalam kegiatan pembangunan (4) upaya-upaya apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan peran perempuan (5) faktor apa sajakah yang dominan berpengaruh terhadap hubungan gender dan (6) bagaimana pemecahan masalah yang dihadapi

perempuan. Maka dengan kerangka ini tentunya akan dapat dihasilkan suatu identifikasi sejauhmana peranan perempuan dalam pembangunan dewasa ini.

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran adalah meningkatkan pembangunan ekonomi pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM ini bertujuan untuk pemberdayaan yang ditujukan kepada pengusaha mikro khususnya untuk kaum perempuan, umumnya perempuan pemilik usaha mikro bergerak dalam sektor informal yang tidak memerlukan modal terlalu besar serta keahlian khusus, sehingga usaha tersebut dapat dilakukan dirumah dengan waktu kerja yang fleksibel. Meskipun pemberdayaan UMKM ini terlihat begitu inovatif, namun tidak ada gunanya jika tidak dilaksanakan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan yang telah disusun itu begitu penting baik bagi sasaran program maupun tercapainya tujuan dari pembuatan kebijakan.

Saat ini berwirausaha menjadi pilihan perempuan untuk dapat bekerja membantu perekonomian keluarganya, namun untuk mendapatkan modal usaha menjadi kendala bagi mereka untuk memulai usaha. Koperasi Wanita Wetan Kantor yang terletak di Jalan ciliwung 1 nomor 58 kelurahan jember lor Kabupaten Jember merupakan salah satu koperasi wanita yang menjadi pilihan perempuan khususnya pemilik usaha mikro untuk mendapatkan modal usaha. Selain mudah untuk bergabung menjadi anggota, koperasi yang dikelola oleh pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM ini memberikan pembinaan dan pengawasan bagi anggota koperasi yang tujuannya untuk memberdayakan perempuan pekerja.

Usaha mikro memiliki peran penting dalam hal penyerapan tenaga kerja karena bersifat padat karya, dapat menanggulangi kemiskinan, serta berperan dalam penyediaan barang dan jasa yang terjangkau. Sejalan dengan hal tersebut dalam perekonomian indonesia, pelaku usaha terbesar berasal dari sektor usaha mikro. Sebagai salah satu komponen utama dalam pengembangan ekonomi lokal,

pemberdayaan usaha mikro memang masih menjumpai adanya kesulitan untuk memperoleh akses pembiayaan melalui lembaga keuangan. Hasil observasi di lapangan menunjukkan banyak dijumpai berbagai macam lembaga keuangan yang menyediakan layanan permodalan, seperti bank Konvensional dan adanya Rentenir. Sejalan dengan pendapat tersebut Bapak Mirfano selaku Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember (dalam wawancaranya pada tanggal 11 maret 2015) menyatakan bahwa,

“ketika mereka membutuhkan uang misalnya 300.000 harus pergi ke bank misalnya ke BCA tidak mungkin, mereka tidak familier terhadap bank mereka pinjam 100.000 ke bank juga tidak mungkin, mereka bisa pinjamnya ke rentenir misalnya, tapi ketika mereka sudah terjerat rentenir mereka tidak akan bisa menambah kapasitas usahanya karena rentenir itu bunganya cukup tinggi”

Rumitnya masalah yang di hadapi oleh pengusaha mikro terutama dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usaha membuat mereka menghadapi permasalahan dan persyaratan mendapatkan modal. Akan tetapi modal menjadi sangat penting karena akan memberikan peluang bagi pengusaha mikro untuk menaikkan level usaha mereka dari usaha mikro menjadi usaha kecil ataupun besar.

Dalam rangka mengatasi masalah permodalan usaha mikro khususnya untuk kaum perempuan pemilik usaha mikro, maka dibutuhkan suatu lembaga keuangan alternatif yang memungkinkan sumber permodalan yang lebih mudah diakses. Kebutuhan akses permodalan inilah yang pada akhirnya mendasari Pemerintah Propensi Jawa Timur untuk mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan usaha mikro perempuan. Sebagaimana tertulis pada surat Gubenur Jawa Timur Nomor 518/9961/103.2/2009 tanggal 09 Desember 2009 tentang pembentukan Koperasi Wanita Tingkat Kabupaten / Kota, kemudian untuk menindak lanjuti keputusan tersebut Bupati Kabupaten Jember mengeluarkan surat keputusan Bupati Nomor 188.45/522/012/2009 tentang alokasi dana kelompok wanita Desa/Kelurahan penerima belanja hibah bantuan modal kabupaten. Pemerintah memberikan wadah bagi para perempuan yang

bergerak dalam usaha mikro untuk menghimpun dan membentuk organisasi ekonomi agar mereka akan lebih mudah dalam mengakses sumber permodalan.

Koperasi dipilih sebagai sarana pemberdayaan usaha mikro karena koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang berasaskan kekeluargaan sehingga dapat dengan mudah diterima di berbagai lapisan masyarakat terutama lapisan bawah. Selain itu koperasi memfungsikan dirinya sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang dapat secara khusus melayani segmen tertentu yaitu kaum perempuan. Fungsi ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351.1/KMK.010/2009, Menteri Dalam Negeri Nomor 900-693A Tahun 2009, Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 01/SKB/M.KUKM/1X/2009 Dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/43A/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Kebijakan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Timur tentang Lembaga Keuangan Mikro Melalui Koperasi Wanita tersebut dilaksanakan diseluruh Wilayah Jawa Timur termasuk Kabupaten Jember .

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember posisi per 31 Mei 2014 Jumlah Koperasi Wanita yang ada di Kabupaten Jember seluruhnya mencapai 270 Koperasi Wanita tetapi yang masih aktif 261 dengan seluruh jumlah anggotanya 6.811 dan salah satunya adalah Kopersasi wanita Wetan Kantor yang terletak di Jalan Ciliwung 1 nomor 58 Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember yang berbadan hukum Nomor 518/713.BH/XVI.7/410/2009. Koperasi Wanita ini menjadi sangat menarik karena mampu memberikan dampak yang positif bagi para anggotanya yang diataranya adalah :ada peningkatan pendapatan, penyediaan akses modal yang mudah bagi mereka, dan timbulnya kreatifitas dan inisiatif.

Hal ini juga terlihat dari jumlah pendapatan usaha Kopwan wetan kantor dari tahun 2012 hingga tahun 2014 yang berkembang sangat baik, yang terlihat dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1 Perolehan Pendapatan Usaha Koperasi Wanita Wetan Kantor Tiga Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Pendapatan	Jumlah Kenaikan	Presentase
1	2012	22.071.900,-	-	-
2	2013	28.501.350,-	6.429.450,-	29,13%
3	2014	54.437.300,-	20.872.100,-	91%

Sumber : kopwan wetan kantor

Salah satu bentuknya adalah dengan adanya Perkembangan perolehan Hasil Usaha yang relatif stabil dari tahun ke tahun yaitu mulai tahun 2012 hingga tahun 2014. Jumlah pendapatan usaha di peroleh dari jasa pinjaman ditambah dengan hasil administrasi pinjaman yaitu pada tahun 2012 jasa pinjaman senilai 14.569.400,- di tambahkan dengan administrasi pinjaman yaitu sebesar 7.502.500 sehingga jumlah pendapatan hasil usaha pada tahun 2012 mencapai 22.071.900, pada tahun 2013 jumlah pendapatan usaha Koperasi Wanita Wetan Kantor naik sekitar 6.429.450,- dengan rincian jasa pinjaman pada tahun 2013 sebesar 20.234.750 dan administrasi pinjaman sebesar 8.266.600 sehingga persentase (perkembangan dari tahun ke tahun) pada tahun 2012 ke 2013 naik sebesar 29,13%, dengan jumlah pendapatan pada tahun 2013 sebesar 28.501.350 dan pada tahun 2014 persentase (perkembangan dari tahun ke tahun) kenaikan hasil usaha semakin meningkat yaitu sebesar 91% dengan rincian jasa pinjaman tahun 2014 sebesar 41.940.300,- dan administrasi pinjaman pada tahun 2014 sebesar 12.497.000 sehingga jumlah pendapatan pada tahun 2014 mencapai 54.437.300.

Tabel 1.2 Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Wanita Wetan Kantor Tiga Tahun Terakhir Yaitu Tahun 2012 Sampai Tahun 2014

Tahun	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Total SHU	Kenaikan	Persentase
2012	Rp 22.071.900,-	Rp 14.492.800,-	Rp 7.579.100,-	-	-
2013	Rp 28.501 350,-	Rp 17.599.900,-	Rp 10.901.450,-	Rp 3.322.350,-	Rp 43.84%
2014	Rp 54.437.300,-	Rp 19.248.400,-	Rp 35.188.900,-	Rp 24.287.450,-	Rp 222.79%

Sumber: kopwan wetan kantor

Data diolah dari pembukuan Koperasi Wanita Wetan Kantor 2012-2014 berdasarkan tabel tersebut Sisa Hasil Usaha (SHU) pada tahun 2012 , 7.579.100, pada tahun 2013 Sisa Hasil Usaha (SHU) mengalami kenaikan sebesar 43,84%

(3.322.350) sehingga total menjadi 10.901.450 dan pada tahun 2014 Sisa Hasil Usaha mengalami kenaikan yang sangat meningkat yaitu sebesar 222.79% (24.287.450) sehingga total Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2014 sebesar 35.188.900, dengan jumlah 24 kelompok (73 kelompok) hal ini dikarenakan adanya penambahan hutang sukarela dari anggota dan juga dikarenakan adanya program baru untuk pinjaman anggota, selain sistem pembayaran secara mingguan juga ada pinjaman dengan sistem pembayaran secara bulanan. Dari Anggota Kopwan Wetan Kantor tentu berbeda-beda setiap jenis usahanya, berikut adalah jenis-jenis usaha yang digeluti Anggota Koperasi Wetan Kantor .

Tabel 1.3 Jenis-Jenis Usaha Pelaku usaha mikro Koperasi Wetan Kantor Berserta Jumlah Anggota

No	Jenis Usaha	Jumlah Anggota
1	Mlijo	8
2	Kios Rokok	6
3	Makanan Ringan	12
4	Penjahit	1
5	Loudry	1
6	Toko (Pracangan)	9
7	Sovernir (Aksesoris)	5
8	Nasi bungkus/kotak	6
9	Minuman	15
10	Usaha Tidak Tetap	10
Jumlah	10	73

Sumber: kopwan wetan kantor

Berdasarkan tabel diatas merupakan jumlah anggota dan jenis usaha yang yang mendapatkan penerimaan bantuan modal dari kopwan Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor. Hasil observasi dilapangan membuktikan bahwa peningkatan modal usaha mikro melalui koperasi mampu meningkatkan ekonomi anggotanya sehingga akses permodalan bagi perempuan pengusaha mikro menjadi sangat penting karena ketika tidak satupun lembaga keuangan yang mereka akses, lembaga keuangan mikro memungkinkan dapat mereka memperoleh akses keuangan yang mudah, dan murah. Koperasi Wanita Wetan Kantor dapat melihat banyaknya manfaat yang diperoleh para perempuan pengusaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Dengan adanya koperasi wanita mereka dengan

mudah memperoleh akses permodalan sehingga dengan adanya koperasi wanita tersebut mereka bisa mengembangkan usahanya.

Hal ini juga dapat dilihat dari peningkatan pendapatan usaha anggota koperasi Wanita Wetan Kantor sebelum dan sesudah menjadi anggota yang dapat terlihat dalam Tabel 1.4 Tabel Peningkatan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Modal dari Koperasi Wanita Wetan Kantor:

No.	Nama Anggota Koperasi Wanita Wetan Kantor	Jenis Usaha	Pendapatan ¹	Pendapatan ²	*Presentase (%)
1	Ibu Kapti	Pracangan	Rp 700.000,-	Rp 1.240.000,-	77%
2	Ibu Sulasmia	Laundry	Rp 1.000.000,-	Rp 1.500.000,-	50%
3	Ibu Sumila	Bakso(usaha tidak tetap)	Rp 1300.00,-	Rp 1.900.000,-	46%
4	Ibu Misnaton	Aksesoris (sovenir)	Rp 250.000,-	Rp 350.000,-	40%
5	Ibu Iva	Makanan ringan	Rp 2.900.000,-	Rp 4.200.000,-	45%
6	Ibu Yuni sulastri	Nasi kotak	Rp 1.900.000,-	Rp 3.250.000,-	71%
7	Ibu Nurjiatin	Minuman	Rp 3000.000,-	Rp 4.700.000,-	57%
8	Ibu Legiwati	Jualan rokok	Rp 800.00,-	Rp 1.500.000,-	88%
9	Ibu Khusnul	penjahit	Rp 900.000,-	Rp 1.300.000,-	44%
10	Ibu Mina	Mlijo	Rp 900.000,-	Rp 1.450.000,-	61%

Pendapatan ¹ adalah pendapatan usaha anggota setiap bulanya sebelum mendapatkan bantuan permodalan dari Koperasi Wanita Wetan Kantor.

Pendapatan ² adalah pendapatan usaha anggota setiap bulan setelah mendapatkan bantuan permodalan dari Koperasi Wanita Wetan Kantor.

Persentase (%) * yang di maksud merupakan persentase perkembangan pendapatan usaha mikro sebelum dan sesudah menerima bantuan permodalan dari Koperasi Wanita Wetan Kantor.

Data diolah dari pembukuan usaha anggota Koperasi Wanita Wetan Kantor dan hasil wawancara.

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan usaha mikro anggota mengalami peningkatan dibandingkan sebelum mendapatkan bantuan modal dari koperasi. Rata-rata peningkatan pendapatan mereka adalah sebesar 58%.

Adapun usaha yang digeluti oleh perempuan pemilik usaha mikro tersebut antara lain adalah usaha Pracangan digeluti oleh Ibu Kapti yang mengalami peningkatan sebesar 77%, Ibu Sulasmina mengalami peningkatan sebesar 50% usaha yang di geluti beliau Laundry, Ibu Sumila usaha beliau berjualan bakso mengalami peningkatan sebesar 46%, Ibu Misnatun usaha beliau adalah membuat Aksesoris (sovenir) mengalami peningkatan sebesar 40%, Ibu Iva usaha beliau adalah makanan ringan mengalami peningkatan sebesar 45%, usaha Ibu Yuni sulastris usaha beliau adalah nasi kotak mengalami peningkatan 71% , usaha Ibu nurjiatin usaha beliau adalah minuman mengalami peningkatan sebesar 57%, selanjutnya yaitu usaha ibu Legiwati usaha beliau adalah koin rokok mengalami peningkatan sebesar 88%, ibu siti khusnul usaha beliau adalah seorang penjahit usaha beliau mengalami peningkatan sebesar 44%, sedangkan untuk usaha Mlijo yang digeluti oleh ibu mina mengalami peningkatan sebesar 61%.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapat dipahami bahwa permodalan dapat menjadi kekuatan besar dalam mendukung jalannya pembangunan bila mampu dikelola dengan baik dari potensi-potensi kecil seperti ini bila diakumulasi maka dapat menjadikan pondasi perekonomian negara yang kuat karena pemberdayaan tidak berfokus pada peningkatan ekonomi namun juga kapasitas diri.

Oleh karena itu pelaksanaan yang tepat dan suatu rencana yang baik akan menjadikan salah satu indikator dalam sebuah pelaksanaan yang telah direncanakan. Berdasarkan uraian di atas yang melatar belakangi dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui tentang *Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor* yang dilakukan pada saat pelaksanaan pinjaman dengan perencanaan pinjaman yang telah ditentukan pada Petunjuk Teknik Operasional. Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan mekanisme simpan pinjam dari tahap pengajuan sampai dengan tahap pelunasan pinjaman di Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor. Sehingga dengan demikian penulis

mengambil judul “Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember lor”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian kualitatif pada hampir semua hal tidak jauh beda dengan apa yang dirumuskan dalam berbagai desain penelitian sosial termasuk desain penelitian kuantitatif. Namun, apabila rumusan masalah ditujukan bagi desain penelitian kualitatif, maka fenomena penelitian diformulasikan agar dapat memenuhi persyaratan sebagai masalah kualitatif. Jadi, rumusan masalah kualitatif merumuskan substansi kategorisasi, substansi struktur, dan substansi model dalam suatu permasalahan penelitian. Setelah masalah diketahui, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan rumusan masalah.

Sugiyono (2009:35) menjelaskan bahwa:

“rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antar masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus di dasarkan pada masalah.”

Berdasarkan ulasan yang peneliti kemukakan pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor?.”**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Pada setiap kegiatan penelitian, pasti terdapat tujuan penelitian tertentu. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mempermudah peneliti ataupun pihak lain dalam mengetahui apa tujuan dari penelitian yang dilakukan. Secara umum, tujuan penelitian adalah pernyataan jawaban atas pertanyaan mengapa peneliti ingin melakukan penelitian tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah

mendeskripsikan hasil Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Peneliti

Melatih diri dan menambah wawasan peneliti melalui pengimplementasian teori yang diterima di bangku kuliah, sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

b. Praktis

Hasil penelitian dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi administrator publik dalam membuat kebijakan yang lebih baik dengan melihat deskripsi hasil penelitian, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal, efektif dan tepat sasaran.

c. Akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan untuk peneliti berikutnya (peneliti lainnya), yang akan melakukan penelitian yang serupa.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep

Konsep merupakan “abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu” (Singarimbun dan Effendi, 2008: 34). Konsep dalam sebuah penelitian digunakan oleh peneliti untuk memudahkan mereka dalam menyederhanakan pemikirannya. Singarimbun dan Effendi (2008:32-33) menyatakan, “dalam penelitian, seorang peneliti menggunakan istilah yang khusus untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak ditelitinya”. Selanjutnya “melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (*events*) yang berkaitan satu dengan lainnya” (Singarimbun dan Effendi, 2008:33).

Lebih lanjut bahwa konsep dalam sebuah penelitian itu memiliki peranan yang begitu penting. Singarimbun dan Effendi (2008:34) menyatakan,

peranan konsep dalam penelitian sangat besar karena dia adalah yang menghubungkan dunia teori dan dunia observasi, antara abstraksi dan realitas. Dalam penelitian sosial peranannya menjadi bertambah penting karena “realitas” sosial yang menjadi perhatian ilmu sosial banyak yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia sehingga sering timbul masalah dalam pengukuran konsep tersebut. Untuk itu konsep perlu didefinisikan secara tepat sehingga tidak terjadi kesalahan pengukuran.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa dalam suatu penelitian konsep yang dapat diterjemahkan sebagai pedoman secara umum dalam menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dalam objek penelitian. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Konsep pembangunan;
2. Konsep kemiskinan;
3. Konsep efektivitas;
4. Konsep pemberdayaan;
5. Konsep usaha mikro;
6. Konsep Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Koperasi Wanita;

2.2 Konsep pembangunan

Kata pembangunan berasal dari kata “bangun” yang berarti sadar, siuan, bangkit, dan juga berarti bentuk. Dalam kata kerja “bangun” juga berarti membuat, mendirikan, atau membina. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan meliputi bentuk (anatomis), kehidupan (isologis) dan perilaku (behavioral). Lebih dari itu, kata “pembangunan” telah menjadi bahasa dunia. Keinginan bangsa-bangsa untuk mengejar bahwa memburu masa depan yang lebih baik menurut kondisi dan cara masing-masing melahirkan berbagai konsep pembangunan. Antara, lain, pertumbuhan (growth), rekonstruksi (reconstruction), modernisasi (modernization), westernisasi (westernization), pembaharuan (innovation), pembangunan bangsa (nation building), pembangunan nasional (national development), pembangunan (development), pembangunan dan pembinaan. Ndara (dalam Surjono dan Nugroho 2008:1).

Menurut Siagian (dalam surjono dan Nugroho 2008:2), pembangunan merupakan suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Bryant dan White (dalam Surjono dan Nugroho 2008:2) menyebutkan bahwa pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dan memiliki lima implikasi utama, yaitu:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (capacity);
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai, dan kesejahteraan (equity);
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment);
4. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan saling menguntungkan dan menghormati (interdependence).

2.3 Konsep kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan

pekerjaan(diaksesdari<http://www.sigana.web.id/index.php/kemiskinanabsolut.htm> l. pada tanggal 06 november 2014). Kemiskinan senagtiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun praktisi. Dalam konteks masyarakat indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senang tiasa relevan untuk dikaji secara terus-menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama melainkan pula karena masalah ini masih hadir ditengah-tengah masyarakat Indonesia dan bahkan kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang dihadapi oleh bangsa ini.

Berbagai konsep dan pendekatan terus-menerus dikembangkan untuk melukiskan mengenai kemiskinan. Suyanto (1996:1) membedakan kemiskinan menurut jenisnya dan penyebab yang melatar belakanginya.

- a. Menurut jenisnya, kemiskinan dibedakan ke dalam dua kategori:
 1. Kemiskinan Relatif, yakni yang dinyatakan dengan beberapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan pendapatan lainnya.
 2. Kemiskinan Absolut, yakni suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti: sandang, pangan dan pemukiman.
- b. Menurut penyebab yang melatar belakanginya, kemiskinan juga dibedakan ke dalam dua kategori:
 1. Kemiskinan Alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka dan / atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alamiah memang ada.

2. Kemiskinan buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Pengertian kemiskinan buatan seringkali diidentikkan dengan pengertian kemiskinan struktural.

2.3.1 Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai dimensi. SMERU (dalam Surjono dan Nugroho, 2008:40) menyatakan dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ketidak mampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan);
- b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, parit bersih, dan transportasi);
- c. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga);
- d. Kerentangan terhadap guncangan yang bersifat individu maupun massal;
- e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam;
- f. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat;
- g. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja yang berkesinambungan;
- h. Ketidak mampuan untuk berusaha karena efek fisik maupun mental;
- i. Ketidak mampuan dan ketidak beruntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil.

2.3.2 Kriteria Kemiskinan

Di indonesia usaha untuk memahami kemiskinan lebih didominasi oleh penggunaan konsep kemiskinan absolut. Kemiskinan sendiri memiliki beberapa ciri yaitu, SMERU (dalam Suharto et al., 2004:7-8):

- 1) Ketidak mampuan memenuhi konsumsi dasar (sandang,pangan,papa);
- 2) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan,pendidikan,sanitasi,air bersih dan transportasi);
- 3) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga);
- 4) Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun masal;
- 5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam;
- 6) Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat;
- 7) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan;
- 8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
- 9) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga,janda miskin,kelompok marjinal dan terpencil).

Dengan menggunakan prespektif yang lebih luas lagi, Davic Cox (2004:1-6) dalam Suharto (2005:132-133) membagi kemiskinan kedalam beberapa dimensi:

- 1) Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan ada yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan persyaratan globalisasi;
- 2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan);
- 3) Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas;

- 4) Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal diluar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.

2.4 Konsep Efektivitas

2.4.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha dan hasil pelaksanaan dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

2.4.2 Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektivitas

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya pemilik usaha mikro dalam pelaksanaan simpan pinjam dari proses pemijaman hingga pelunasan berjalan sesuai dengan petunjuk SOP yang ada di Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor.
2. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu pelaksanaan apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka hasil dari pelaksanaan tersebut tidak akan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, karena dengan pelaksanaan efektivitas semakin didekatkan pada hasilnya.

Dengan demikian diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan. Dalam hal ini adalah efektivitas pelaksanaan Simpan Pinjam yang ada di Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor.

2.4. Konsep Pemberdayaan

2.4.3 Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. kekuasaan sering kali di kaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks hubungan sosial antar manusia dan terciptanya melalui hubungan itu. Karena itulah kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemaknaan kekuasaan yang seperti ini, maka pemberdayaan itu merupakan suatu proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna.

Terdapat banyak pemaknaan dari kata pemberdayaan. Beberapa diantaranya yaitu kekuatan, kemampuan, daya, kesanggupan dan lain sebagainya namun pada dasarnya mempunyai maksud yang sama dan masih terkait dengan pemberdayaan. Bersted (dalam Suharto, 2003:3) menyatakan bahwa, “Power as the ability to employ force” (daya merupakan kemampuan untuk menggunakan kekuatan). Selanjutnya Rappaport (dalam Suharto, 2005:59) menyatakan bahwa, pemberdayaan merupakan suatu cara dengan rakyat organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Sulistiyani (2004:79) yang menyatakan bahwa,

“pada hakikatnya [sic] pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari, atau daya tersebut masih belum diketahui.....”.

Penciptaan suasana atau iklim yang di Maksud oleh Sulisyani tersebut sejalan dengan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 pasal 60 sebagai berikut.

1. Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan koperasi.
2. Pemerintah memberi bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi.

Selanjutnya, untuk mengetahui lebih dalam mengenai definisi pemberdayaan, Soeharto (2005:59) menyatakan bahwa,

“ pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya”.

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu tindakan berupa transfer daya yang memungkinkan seseorang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Namun keberdayaan tersebut harus didukung dengan iklim yang mendukung seperti akses informasi, bimbingan, bantuan permodalan. Dalam setiap pemberdayaan yang dilakukan suatu pihak tentu didalamnya mengandung maksud dan tujuan yang jelas. Suharto (2005:60) menyatakan,

“tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya di tinas oleh struktur sosial yang tidak adil)”.

Adapun tujuan secara spesifik dari pemberdayaan usaha mikro menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Dan Kecil Menengah (2007:5) adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

- b. Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pasang pasar koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- c. Meningkatkan Akses sumber daya produktif.
- d. Meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada *[sic]* sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk membantu pihak yang lemah menjadi lebih berdaya dengan cara meningkatkan kemampuan, kekuasaan, hingga ketrampilan mereka agar mereka menjadi lebih mandiri dan sanggup menentukan sikap. Dalam hal ini, agar mereka mampu mengambil keputusan serta tindakan dalam menghadapi hambatan baik dari diri mereka maupun dari luar yang mengganggu dan menghambat mereka dalam upaya melepaskan diri dari masalah-masalah seperti kemiskinan yang mereka alami.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa tujuan dari pemberdayaan itu mengarah kepada tercapainya masyarakat yang berdaya. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa sasaran dari suatu pemberdayaan adalah masyarakat yang tidak berdaya. Menurut Suharto (2005;60) bahwa terdapat beberapa kelompok yang bisa dimasukkan ke dalam kategori sebagai kelompok tidak berdaya. Pertama adalah kelompok lemah secara struktural. Adapun contoh yang termasuk didalam kelompok ini adalah lemah secara kelas dan gender. Kemudian yang kedua adalah kelompok lemah khusus semisal anak-anak, manula, dan masyarakat terasing. Terakhir adalah kelompok lemah secara personal yaitu mereka yang mengalami permasalahan pribadi dan/atau keluarga.

2.5.2 Pemberdayaan perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Posisi perempuan hanya membaik ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Adapun pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik didomain publik maupun domestik.(diakses dari <http://www.fifensulistyyowati.blogspot.com/2013/07/pemberdayaan-perempuan.html?m=1>. pada tanggal 5 september 2014).

Dalam rangka meningkatkan daya perempuan Krisnawaty (dalam Ridjal, 1993:165) berpendapat bahwa, “...memperkuat posisi perempuan miskin antara lain dengan mendekatkan akses informasi (pendidikan, keterampilan, dan hak asasi) serta memfasilitasi pembentukan organisasi perempuan yang berorientasi pada kepentingan dasar...”.

penguatan (empowerment) juga dapat dilakukan dengan cara mobilisasi sumber daya lokal. Ridjal(1993:137)juga menyatakan,

“sumber daya lokal ini hendaknya tidak diartikan sebagai sumber daya finansial saja tetapi juga sumber daya lain seperti tenaga, pengetahuan akan sejarah komunitas, intelektualitas, rasa saling percaya dan saling menghargai, dan solidaritas”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa organisasi sangatlah penting dalam pemberdayaan. Hal tersebut dikarenakan organisasi memungkinkan perempuan memperoleh akses informasi serta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan. Sejalan dengan pendapat tersebut Flora et al. (dalam Sujono dan Nugroho,2008:39) menyatakan, ”..wanita dapat berdaya melalui pembentukan organisasi atau kelompoknya dengan berbagai tujuan”. Selanjutnya, Pranarka (dalam Sujono dan Nugroho, 2008:39) menyatakan bahwa,

“wanita yang bekerja dengan wanita lain dalam organisasi atau kelompok akan lebih berdaya, jaringan kerja dan berorganisasi

merupakan tindakan kolektif yang cenderung memperkuat proses pemberdayaan wanita”.

berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa organisasi sangat penting dalam rangka pemberdayaan. Dalam organisasi, perempuan dapat memberikan pendapat serta belajar untuk beradaptasi dengan cepat, sehingga tumbuh pribadi yang cekatan dalam mengambil suatu tindakan.

2.5.3 Indikator Keberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu di optimalkan

Schuler, Hashwmi dan Riley (dalam Suharto: 63) menyatakan bahwa :

“keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi derajat kekuasaan, yaitu : kekuatan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuatan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*)”.

Berdasarkan pendapat Schuler, Hashwmi dan Riley tersebut lebih lanjut dapat digambarkan keberhasilan pemberdayaan yang dilihat dari tingkat pemberdayaan dengan kekuasaan masyarakat, dimana masyarakat tersebut adalah perempuan yang memiliki usaha. Berikut adalah tabel tingkat keberhasilan masyarakat yang dilihat berdasarkan indikator keberdayaan :

Tabel 2.1 Indikator keberdayaan

Jenis Hubungan kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
Kekuasaan di dalam;	-Evaluasi Positif	-Kepercayaan diri dan kebahagiaan	- <i>Assertiveness</i> dan ekonomi

meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah	terhadap kontribusi ekonomi dirinya -Keinginan memiliki kesamaan terhadap sumber yang ada pada rumahtangga dan masyarakat	-Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara -Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain -Keinginan untuk mengontrol jumlah anak	-Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi diskriminasi hukum dan pengucilan politik -Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum dan politi -Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah Pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan kebudayaan -Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintang akses terhadap proses hukum, politik dan kebudayaan budaya hukum dan politik
Kekuasaan untuk: meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; Meningkatkan	-Akses terhadap pelayanan keuangan mikro -Akses terhadap pendapatan -Akses terhadap asset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga -Akses terhadap pasar -Penurunan beban dalam pekerjaan domestic, termasuk perawatan anak	-Keterampilan, termasuk kemelekan huruf -Status kesehatan dan gizi -Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan produksi -Ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik	
Kekuasaan atas: Perubahan habatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro; kekuasaan atau tindakan individu untuk	-Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya -Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif keluarga yang lainnya -Kontrol atas	-Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana -Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan	

menghadapi hambatan-hambatan tersebut.	aset produktif dan kepemilikan keluarga -Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga -Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar -Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern -Mampu member gaji terhadap orang lain -Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro	masyarakat	
Kekuasaan dengan: meningkatkan solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat kekuasaan dan rumah tangga masyarakat dan makro		-Penghargaan tinggi terhadap peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga -Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik	- Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis -Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi pelakuan salah dalam keluarga dan masyarakat -Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat cultural, politis, hukum pada tingkat masyarakat dan makro.

Sumber: Soeharto, (2005:65)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator keberdayaan dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain jenis hubungan kekuasaan, kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, kemampuan kultural dan politis. Pada kolom tersebut dijelaskan bahwa indikator keberdayaan masyarakat salah satunya adalah akses terhadap pelayanan keuangan mikro, akses terhadap pasar, serta ketrampilan. Ketiga hal tersebut erat kaitannya

dengan penelitian ini dimana pemberdayaan fokus pada usaha mikro yang berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi sehingga dapat mengantarkan masyarakat menuju kemandirian.

2.5.4 Model-model Pemberdayaan

Jika kita berbicara tentang model, model dapat membantu sebuah penelitian untuk memahami hal yang sebelumnya tidak diketahui. "...kita tidak memiliki jalan pikiran [sic] tentang sesuatu yang tidak kita kenal kecuali apabila dia di kaitkan dengan model"(Riggs, 1988:6).

Terdapat beberapa model yang umumnya digunakan dalam pemberdayaan, dan pada penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran bagaimana model-model pemberdayaan yang ada. Model-model pemberdayaan tersebut antara lain sebagai

a. **Model Kemitraan**

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologi diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari kata *patner*, *patner* dapat diterjemahkan "pasangan, jodoh, sekutu atau kompayon. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian" (Sulistiyani, 2004:129-130). Berdasarkan dari pengertian tersebut di atas, maka kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Ada dua pihak atau lebih.
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan.
3. Ada kesepakatan.
4. Saling membutuhkan.

Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak perseorangan maupun badan hukum atau kelompok-kelompok. Adapun macam model kemitraan adalah menurut Sulistiyani (2004: 130) adalah sebagai berikut.

1. Kemitraan semu (*preudo partnership*)

Adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahwa pada suatu pihak belum tentu memahami benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk apa semua itu dilakukan serta disepakati. Sebagai contoh slogan “pembangunan dari oleh pemerintah untuk rakyat” pada jaman orde baru. Rakyat yang berposisi sebagai mitra kerja pemerintah sesungguhnya tidak mengetahui apa makna semua itu, walaupun mereka yakin bahwa itu sangat penting.

2. Kemitraan mutualistik, atau (mutualism partnership).

Kemitraan ini merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu untuk saling memberi manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu sama lain.

3. Kemitraan melalui peleburan dan pengembangan (conjugation partnership)

Organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dalam model kemitraan terbagi lagi atas dua jenis, yang pertama pengabungan secara ara subordinatif atau subordinate union of partnership yaitu kemitraan antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan tidak seimbang satu sama lain atau tidak dalam satu garis lurus. Oleh karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada sharing dan perang atau fungsi pengabungan pihak-pihak secara garis lurus. Pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Yang menjadi tekanan utama adalah visi dan misi yang saling mengisi satu dengan lainnya.

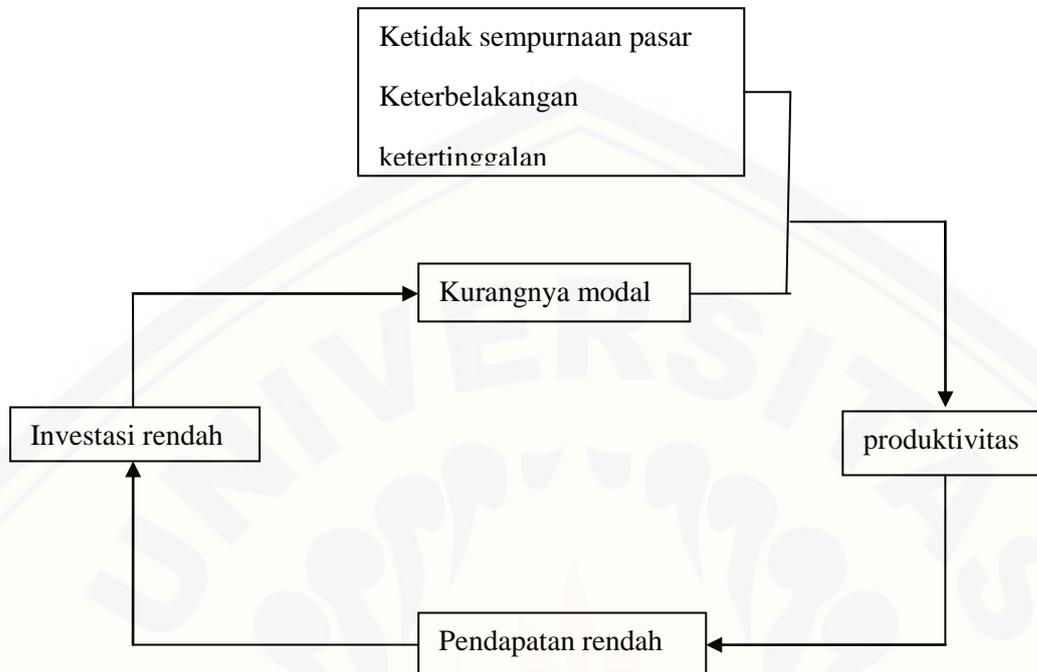
b. Model Pembangunan Berpusat Pada Manusia atau People Centre Development

Dalam konsep pembangunan yang berpusat pada manusia terhadap tiga dasar pemikiran yaitu: (1) memusatkan pikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah mereka pada tingkatan individual, Keluarga, dan komunitas; (2) mengembangkan struktur organisasi yang berfungsi menurut kaidah sistem yang swaorganisasi [sic]; (3) mengembangkan sistem produksi konsumsi yang diorganisir secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah pemilihan dan pengendalian lokasi (Korten dalam Sujono dan Nugroho, 2008:22). Pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development), yaitu pada upaya meningkat taraf hidup masyarakat dengan memfokuskan pada pemberdayaan dan pembangunan manusia itu sendiri, (Adi 2008:66-67). Sejalan dengan pendapat tersebut Sujono dan Nugroho (2008:337) berpendapat dalam,

“model people centre development menitik beratkan pada pembangunan kualitas manusia sebagai upaya untuk memengaruhi [sic] dan mengatur masa depannya. Model ini mencoba mengangkat martabat manusia sebagai mana mestinya sebagai makhluk yang memiliki harga diri, memiliki kemampuan intelegensi, sekaligus memiliki perasaan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, model ini dimasukkan sebagai upaya pemberdayaan dan membantu masyarakat keluar dari perangkap kemiskinan sebagaimana yang di jelaskan oleh Nurkse (dalam Surjono dan Nugroho, 2008:338) pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Lingkaran setan kemiskinan



Sumber: Nurkse (dalam Sujono dan Nugroho, 2008:338)

Lingkaran setan kemiskinan diawali, dari ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, ketertinggalan yang mengakibatkan produktivitas masyarakat yang rendah. Rendahnya produktivitas dapat menyebabkan pendapatan masyarakat rendah sehingga masyarakat belum mampu untuk berinvestasi. Investasi yang rendah dapat berakibat pada modal yang rendah dan seterusnya serta tiada putusya. Oleh sebab itu dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan upaya pemberdayaan yang diarahkan untuk dapat memotong lingkaran kemiskinan tersebut.

c. Model Grameen Bank

Pemberdayaan memang memiliki tujuan yang mulia, namun pelaksanaannya tentu tidak mudah. Model Grameen Bank merupakan sebuah unit bank yang memiliki area pelayanan keuangan 15 sampai 20 desa. Hal yang menjadikan

model ini unik adalah manajer dan karyawan bank yang terjun langsung ke masyarakat untuk menjelaskan dan memperkenalkan program bank pada masyarakat. Grameen Bank menekankan pada sistem kredit yang dianggap ampuh dalam mengatasi kemiskinan serta mampu menimbulkan kegiatan sosial ekonomi yang efektif. Sujono dan Nugroho(2008:34) menjelaskan bahwa,

“metodologi Grameen Bank tidak berbasis pada penilaian kepemilikan seseorang, tetapi berbasis pada potensi dari orang tersebut. Grameen Bank percaya bahwa setiap manusia termasuk yang miskin sekalipun dibekali dengan potensi yang banyak. Meskipun demikian Grameen Bank tetap berusaha mendapatkan keuntungan agar operasional bank tidak terhenti.”

Grameen Bank mempunyai banyak cabang yang tersebar hingga pelosok-pelosok desa agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses sumber keuangan dengan prosedur yang mudah. Pada model ini tidak ada proses hukum yang diterapkan apabila si peminjam kesulitan dalam mengembalikan pinjaman sebagai bank-bank konvensional yang akan membawa nasabahnya ke pengadilan bila kredit macet. Grameen Bank akan bekerja keras dalam menolong pinjaman untuk mendapatkan kekuatan serta kepercayaan diri dalam mengatasi persoalan yang dihadapi.

2.6 Konsep Usaha Mikro

2.6.1 Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun karakteristik usaha mikro yang membedakannya dengan usaha kecil dan menengah menurut undang-undang dapat dilihat berdasarkan besaran aset dan omset yang dimiliki usaha tersebut. Aset maksimal usaha yang digolongkan mikro adalah sebesar lima puluh juta dengan jumlah omset maksimal sebesar tiga ratus juta. Usaha mikro tergolong jenis usaha marginal, ditandai dengan penggunaan

teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal (diakses dari <http://smeru.or.id/report/fied/usahamikro2Buku%202%20Usaha20Mikro%20Edit.ed.pdf> pada tanggal 06 September 2014). Adapun karakteristik dari usaha mikro secara umum adalah sebagai berikut :

- a. bersifat informal dari tidak berbadan hukum;
- b. bersifat fluktuatis baik dari omzet maupun tenaga kerja. Omzet dan tenaga kerja bergantung pada permintaan, musim, serta ketersediaan bahan baku;
- c. tanpa atau hanya menggunakan teknologi sederhana. Teknologi yang termasuk relatif tinggi yang digunakan dalam usaha mikro antara lain mesin jahit dan mesin butut logam;
- d. pelaku usaha mikro relatif mudah berganti jenis usaha. Keluar masuknya usaha mikro relatif mudah karena usaha ini tidak memerlukan keahlian khusus (diakses dari <http://smeru.or.id/report/fied/usahamikro2Buku%202%20Usaha20Mikro%20Edited.pdf> pada tanggal 06 September 2014) .

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa secara garis besar usaha yang termasuk dalam kriteria usaha mikro itu jika usaha tersebut bersifat informal, modal yang digunakan terbatas, tidak memerlukan keterampilan dan keahlian khusus serta teknologi yang dipergunakan masih sederhana. Dapat disimpulkan berdasarkan pengertian dan karakteristik di atas bahwa usaha mikro merupakan usaha yang sederhana. Baik dari sisi modal, pengelolaannya maupun sarana dan prasarana yang dipergunakan. Selain itu, keahlian dan teknologi yang digunakan dalam menjalankan usaha ini cukup relatif rendah. Namun ciri yang menonjol dari usaha mikro adalah permodalan yang digunakan itu tergolong kecil dan minim. Kemudian jenis usahanya juga tidak memerlukan perijinan formal layaknya usaha kecil, menengah, maupun besar. Maka wajar jika sektor informal seperti usaha mikro ini banyak dipilih masyarakat sebagai pilihan usaha mereka khususnya kaum perempuan.

2.6.2 Perempuan Sebagai Pemilik Usaha Mikro

Kegiatan usaha mikro dan usaha kecil tidak lepas dari peran kaum perempuan. Usaha mikro banyak diminati oleh perempuan dengan pertimbangan

bahwa usaha ini dapat menompang kehidupan rumah tangga dan dapat memenuhi kebutuhan pengembangan diri (Sumampouw dalam Smeru,2000). Disamping itu, usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi lokal, dan berpotensi meningkatkan posisi tawar (*bergaining position*) perempuan dalam keluarga. Dimana selama ini perempuan selalu mendapat pelabelan (*stereotype*) dari masyarakat bahwa perempuan itu lemah dan hanya mampu bekerja di wilayah domestik saja. Partisipasi perempuan merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan. Upaya pengembangan usaha mikro yang dilakukan oleh perempuan menjadi penting, karena perempuan berhadapan dengan kendala-kendala tertentu yang dikenal dengan istilah “*triple burden of women*”, yaitu ketika mereka diminta menjalankan fungsi reproduksi, produksi, sekaligus fungsi sosial di masyarakat pada saat yang bersamaan. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi menjadi terbatas. Dimana kecenderungan, sebagian besar usaha mikro dijalankan atau dikelola oleh perempuan.

Untuk mengangkat kondisi perempuan pengusaha mikro maka dibutuhkan wadah yang mampu memfasilitasi segala persoalan yang menghambat kemajuannya. Adapun wadah yang dianggap relevan bagi perempuan pengusaha mikro adalah adanya Koperasi Wanita yang mampu memberi kemudahan perempuan untuk mengakses dana, memasarkan produk, membeli barang baku produk dll.(diakses dari <http://www.yskk.org/berita/koperasi-wanita-solusi-bagi-kemandirian-perempuan-pengusaha-mikro.html/> pada tanggal 06 september 2014)

2.7 Konsep Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Koperasi Wanita

Program Pemberdayaan LKM Melalui Koperasi Wanita merupakan program dinas koperasi UMKM Provinsi Jawa Timur untuk memberdayakan usaha mikro yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember. Program pemberdayaan LKM Melalui Koperasi Wanita ini, mengacu pada hasil dari Surat

Keputusan Menteri Keuangan, Menteri dalam negeri, Menteri Negara Koperasi UMKM dan Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Keuangan mikro berfungsi memberikan dukungan modal bagi pemilik mikro untuk meningkatkan usahanya agar usaha mereka berjalan lebih lancar dan lebih 'besar' setelah mendapat dukungan modal awal, biasanya kebutuhan dana akan semakin meningkat. Karena itu di butuhkan suatu lembaga keuangan mikro yang dapat secara terus-menerus melayani kebutuhan mereka.

Program ini akan memungkinkan pemilik usaha mikro menjadi lebih berdaya karena akan mempermudah mereka dalam memperoleh akses informasi serta permodalan serta menjadi anggota koperasi wanita. Hal yang membedakan koperasi dengan organisasi lain terutama dalam hal pemberdayaan adalah unsur pendidikan yang ada di dalamnya. Pendapat tersebut sesuai dengan tujuan spesifik dari program Pemberdayaan Keuangan Mikro melalui Koperasi Wanita adalah sebagai berikut.

- a. Melalui koperasi, perempuan memiliki suatu wadah untuk mengelolah dan memenuhi kebutuhan anggotanya, dalam hal ini perempuan itu sendiri.
- b. Melalui koperasi, perempuan dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan, karena mereka tahu yang diinginkan dan memiliki kepentingan yang sama.
- c. Melalui koperasi, perempuan dapat menghasilkan sesuatu secara bersama-sama sehingga produktivitas meningkat.
- d. Melalui koperasi, perempuan memiliki akses lebi mudah untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan-kemudahan,(Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Timur,2010:3).

Program pemberdayaan yang berbasis pada peningkatan ekonomi akan membawa masyarakat menuju kemandirian. Selanjutnya dengan hal tersebut Kusyuniati (dalam Ridjal, 1993:4) berpendapat bahwa,

“...menggunakan pendekatan ekonomi, yaitu mendorong masyarakat untuk berwiraswasta mempunyai usaha kecil. Usaha ekonomis produktif ini dimaksudkan agar secara ekonomis masyarakat mandiri. Berangkat dari kemandirian ekonomis,mudah dimotivikasi untuk terlibat dalam semua

program kemasyarakatan. Dan proses ini adalah *empowerment* bagi masyarakat”.

Koperasi dalam pemberdayaan memiliki dua peran penting dalam ekonomi dan sosial yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Sumarsono(dalam Sujono dan Nugroh,2008:15) koperasi dalam peran ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan. Dalam melakukan usahanya koperasi tidak menjadikan keuntungan sebagai motif utamanya.
- b. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha dalam koperasi tidak didasarkan atas besarnya modal, tetapi didasarkan atas perimbangan jasa dan partisipasi masing-masing anggota dalam membentuk volume usaha.
- c. Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi modal lainnya.
- d. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.
- e. Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya
- f. Menyederhanakan dan mengifiensikan sistem tata niaga, yaitu dengan cara mengurangi mata rantai perdagangan yang tidak perlu.
- g. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan.
- h. Menjaga keseimbangan antara pemerintah dan penawaran sebagai suatu organisasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- i. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara efektif, menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam pola konsumsi, membiasakan hidup hemat, dan mengembangkan jiwa membangun bagi umat manusia.

Selanjutnya peran sosial juga diterapkan oleh koperasi dalam rangka memberdayakan masyarakat. Sumarsono (dalam Sujono dan Nugroho 2008:147) peran koperasi dalam bidang sosial adalah sebagai berikut.

- a) Mendidik anggota-anggota untuk memiliki semangat berkerjasama, baik dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka maupun dalam membangun tatanan sosial yang lebih berperikemanusiaan.
- b) Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat berkorban sesuai kemampuan masing-masing demi terwujudnya suatu tatanan sosial yang adil dan beradab.
- c) Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi yang tidak dibangun di atas hubungan-hubungan kebendaan, melainkan atas rasa persaudaraan dan kekeluargaan.
- d) Mendorong suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis yang menjamin dilindungi hak dan kewajiban setiap orang.
- e) Mendorong terwujudnya suatu kehidupan yang tentram dan damai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa koperasi memungkinkan anggotanya untuk lebih berdaya terutama dalam segi ekonomi karena di dalanya para pemilik usaha mikro sarat dengan pendidikan yang dapat meningkatkan kapasitas anggotanya serta didukung fasilitas permodalan yang memadai.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam memecahkan suatu masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Oleh karena itu metode penelitian mempunyai peranan penting dalam tercapainya penelitian. Maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian, sebagai berikut.

1. Fokus penelitian
2. Tipe penelitian
3. Lokasi Penelitian
4. Teknik Penentuan Informan
5. Teknik pengumpulan data
6. Metode analisis data
7. Keabsahan Data

3.1 Fokus Penelitian

Pembatasan pada penelitian sangat diperlukan untuk memudahkan pemahaman bagi pembacanya mengenai penelitian yang dilakukan. Pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2008:38) disebut fokus. Dengan adanya fokus, maka peneliti akan dapat membuat keputusan lebih mudah dalam pencarian data, sehingga dapat diketahui mana data yang diperlukan dalam penelitian dan mana yang tidak diperlukan.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor. Penelitian Ini dilakukan dengan berpedoman pada SOP (stadart operasional prosedur) yang ada di Koperasi Wanita Wetan Kantor. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji bagaimanakah efektivitas pelaksanaan simpan pinjam yang ada pada Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor mulai dengan segmentasi peminjaman sampai dengan pelunasan. apakah pelaksanaanya

sudah sesuai dengan Standart Operasional Prosedur yang ada di Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor.

3.2 Tipe Penelitian

Adapun paradigma penelitian ini adalah kualitatif. Bogda dan Taylor (dalam Moleong,2006:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Selanjutnya menurut Moleong (2006:6) bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai berikut.

Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,dll [sic]., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif.

3.3 Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang ditetapkan. Dalam hal ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang-orang tertentu yang dapat dijadikan sebagai informasi yang diperlukan oleh peneliti didalam proses penelitiannya. Kriteria menentukan informan menurut Spradly dan Faisal (dalam Sugiyono 2008:56-57) adalah sabagai berikut.

- a. Subjek yang telah cukup lama intensif dengan kegiatan yang menjadi subjek dalam penelitian
- b. Subjek yang masih terlihat aktif atau penuh dalam lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti
- c. Subjek yang mempunyai banyak waktu dan kesempatan

- d. Subjek dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah untuk dimintai informasi atau dikemas terlebih dahulu
- e. Subjek yang sebelumnya masih tergolong asing oleh peneliti

Sedangkan metode pengambilan sampel informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Pengertian *purposive sampling* menurut Sugiyono (2008:53-54) yaitu:

“teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.”

Adapun informasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. P
ihak koperasi Wanita wetan Kantor meliputi para pengurus, serta anggota. Adapun pengurus Kopwan Wetan Kantor yang menjadi informasi dalam penelitian ini meliputi Ibu Soleha selaku ketua Koperasi Wanita Wetan Kantor, Bapak Rohim selaku pengawas Koperasi Wanita Wetan Kantor, Bapak Achmad Taufik bidang simpan pinjam, Ibu Atik Sukariyati selaku bendahara ibu husnul selaku sekretaris selain beliau menjabat sebagai sekretaris beliau juga sebagai anggota jenis usaha beliau seorang penjahit. Kemudian untuk anggota kopwan yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi sepuluh anggota usaha mikro yang diantaranya Ibu Ibu Kapti jenis usahanya adalah pracangan, Ibu Sulasmina jenis usahanya adalah Laundry, Ibu Sumila beliau usahanya sering berganti-ganti bisa dikatakan usaha beliau tidak tetap untuk saat ini beliau jualan bakso, Ibu Misnaton usaha beliau membuat aksesoris dan sovenir, Ibu Ifa jenis usaha ibu ifa adalah berjualan makanan ringan, Ibu Sulastry usaha beliau adalah jualan nasi kotak, Ibu Nurjiatin usaha beliau adalah jualan minuman, Ibu Legiwati beliau memiliki kios rokok, Ibu Mina usaha beliau adalah Mlijo ibu husnul jenis usahanya sebagai penjahit. Mereka inilah anggota Kopwan Wetan Kantor yang menerima bantuan permodalan untuk

kegiatan usaha, serta terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan di Koperasi Wanita Wetan Kantor.

3.5

T

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai tujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data dipergunakan oleh peneliti untuk memudahkan dalam menganalisa serta memahami masalah yang menjadi objek penelitian. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1.

W

wawancara (interview)

Wawancara dalam penelitian mempunyai tujuan untuk mengumpulkan data berupa keterangan tentang kehidupan manusia atau dalam suatu masyarakat. Dalam metode ini peneliti akan melakukan tanya jawab yang dilakukan berdasar tujuan penelitian. Peneliti dalam hal ini akan bertindak sebagai pewawancara yang akan mengajukan pertanyaan kepada informan sebanyak mungkin yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data melalui teknik wawancara ini yaitu bolpoin sebagai alat menulis serta mencatat dalam media berupa kertas, selanjutnya yaitu alat perekam (*recorder*) dalam bentuk *handphone*.

2. Dokumentasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:73), “teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.” Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dokumen resmi yang terbagi atas dokumen internal yang berupa norma dan aturan lembaga masyarakat. Dokumen eksternal dapat diperoleh data tambahan yang dapat membantu untuk mendapatkan informasi.

3. Observasi

Usman dan Akbar (2004:54), “Observasi ialah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis.” Dalam

menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.

4. Studi kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku dan referensi lainnya serta literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Penulis berusaha mencari buku-buku, jurnal dan lain-lain yang dapat dijadikan acuan, referensi data tambahan yang dapat membantu untuk mendapatkan informasi.

3.6 Metode Analisis Data

Adapun data yang digunakan dalam menganalisis masalah penelitian ini dengan menggunakan metode analisis interaktif. Dalam model analisis ini terdapat tiga komponen, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman. 1992:20 dikutip dalam Sugiyono 2008:91), dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2008:92) bahwa “mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya”. Data yang diperoleh dilokasi penelitian (lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan itu kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari temanya atau polanya. Selama pengumpulan data berlangsung diadakan tahap reduksi data selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, mencari tema-tema, menulis memo, dan lain-lain). Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

2. Penyajian Data

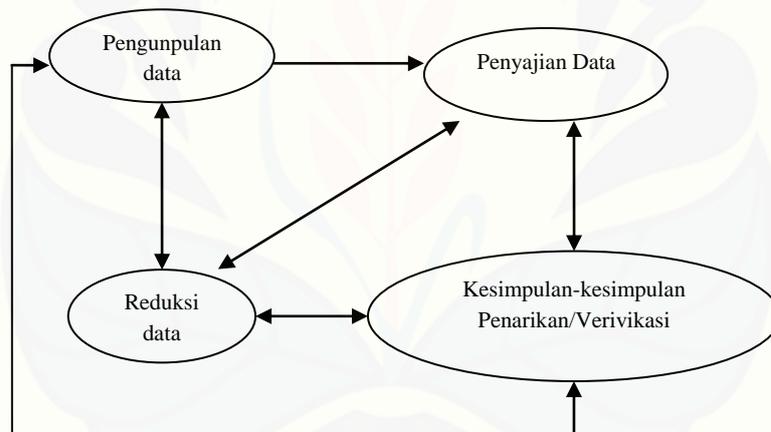
Menurut Sugiyono (2008:95) menyatakan bahwa “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian data adalah untuk memudahkan

membaca dan menarik kesimpulan. Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, bahkan mencakup pula reduksi data”.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verivikasi

Menurut Sugiyono (2008:99) menyatakan bahwa “kesimpulan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori

Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman(2007:20)

3.7 Keabsahan Data

Dalam setiap penelitian memerlukan adanya standar untuk melihat drajat kepercayaannya dan keberadaannya dari hasil penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif standar tersebut disebut dengan keabsahan data. Menurut Moleong (2005:324) menyatakan bahwa ”untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan

atas sejumlah kriteria tertentu, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*tranferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*conformability*)”.

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini, maka peneliti menggunakan metode triangulasi. Menurut Moleong (2005:330) menyatakan bahwa ”triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Daerah Penelitian

Deskripsi daerah penelitian merupakan gambaran tentang lokasi dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Wanita Wetan Kantor yang terletak dikelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang , Kabupaten Jember dan Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember. Dengan memperlihatkan deskripsi lokasi penelitian akan membantu penulis dalam memahami Program Pemberdayaan Usaha Mikro melalui koperasi wanita di desa tersebut. Deskripsi daerah penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan serta informasi guna memahami keadaan senyatanya mengenai daerah penelitian sehingga mampu menambah pengertian, wawasan dan memudahkan penjabaran.

4.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Jember Lor

Kelurahan Jember Lor terdapat di Kecamatan Patrang yang mempunyai luas 247.176 Ha yang terdiri dari 101.530 ha sawah, 88.5 ha tegal, 14,5 ha perkarangan dan lain-lain 42.646 Ha. Terdiri dari 6 dusun atau lingkungan, 24RW dan 88 RT. Fasilitas perdangan 9 bank, 1 koperasi, 1 KUD, 2 pasar.

Secara geografis Kelurahan Jember Lor berbatasan dengan desa-desa lain atau kecamatan yang diantaranya:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan :Kelurahan Patrang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan :Jember Kidul
3. Sebelah Timur berbatasan dengan :Sumber Sari
4. Sebelah Barat berbatasan dengan :Gebang

4.1.2 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Jember Lor sebanyak 19.326 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 jumlah penduduk kelurahan jembr lor

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	9.291 jiwa
2	Perempuan	10.035 jiwa
	Total	19.326 jiwa

Sumber: profil kelurahan jembr lor

Potensi sumberdaya manusia di Kelurahan Jember Lor juga dapat dilihat dari aspek kesejahteraan keluarga. Adapun penjelasan kesejahteraan keluarga di Jember Lor dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 kesejahteraan keluarga di kelurahan Jembr Lor

No	Uraian	Jumlah	Persentase (%)
1	Prasejahtera	460 KK	31.08
2	Sejahtera I	835 KK	56.43
3	Sejahtera II	1.918 KK	0.13
4	Sejahtera III	1.899 KK	0.128
5	Sejahtera III Plus	181 KK	12.23
	Total	19.326 KK	100

Sumber: profil kelurahan jembr lor

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa angka kesejahteraan keluarga di Kelurahan Jember Lor yang pertama pada tingkat keluarga prasejahtera adalah sebanyak 460 KK dengan presentase sebesar 31.08%. jumlah keluarga sejahtera I adalah sebanyak 835 KK dengan presentase 56.43%. selanjutnya yaitu keluarga sejahtera 2 adalah sebanyak 1.918 KK dengan presentase sebesar 0,13% dan keluarga sejahtera 3 adalah 1.899 KK dengan presentase sebesar 0,128%. Kemudian yang terakhir adalah jumlah keluarga sejahtera 3 plus sebanyak 181 KK dengan presentase sebesar 12.23%. Apabila diamati menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif (18-56 tahun) sebanyak 4.464 jiwa dan jumlah usia tidak produktif (usia 18-56 tahun ke atas)

sebanyak 168 jiwa. Kualitas pendidikan mempunyai pengaruh tingkat kesejahteraan. Apabila dalam suatu desa kualitas penduduk rendah maka tingkat kesejahteraan penduduk di desa tersebut rendah pula.

Tabel 4.3 Status Mata Pencaharian Kelurahan Jember Lor

No	Status	Jumlah
1	Pertanian	1,790
2	Perdagangan	5,21
3	Kerajinan	437
4	PNS	142
5	Perternakan	852
6	Lainya	112
	Total	3,854

Sumber: Profil Kelurahan Jember Lor

4.1.3 Sarana Prasarana

Prasarana pemerintahan merupakan penting yang ada di Kelurahan Jember Lor. Karena prasarana pemerintahan merupakan penunjang pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pemerintahan desa atau kelurahan.

Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Kelurahan Jember Lor

No.	Jenis Prasarana	Ada/Tidak	Kondisi
1	Gedung Kantor	Ada	Baik
2	Jumlah Ruangan Kerja	Ada	Baik
3	Balai desa / Kelurahan / sejenisnya	Ada	Baik
4	Mesin tik	Ada	Baik
5	Meja	Ada	Baik
6	Kursi	Ada	Baik
7	Almari arsip	Ada	Baik
8	Computer dan printer	Ada	Baik
9	Papan Tulis	Ada	Baik

10	Brangkas	Ada	Baik
	Jumlah sarana	Ada	Baik

Sumber: Profi Kekurahan Jember lor

4.2 Gambaran Umum Koperasi Wanita Wetan Kator

Koperasi Wanita Wetan Kantor terletak di lingkungan wetan kantor jalan Ciliwung 1 No.58 Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Awalnya kopwan wetan kantor ini bermula dari LKMM wetan kantor (Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat), karena LKMM ini bisa dikatakan lebih maju dalam artian di bandingkan dengan yang lain, sudah memakai komputerisasi dan kemudian muncul dari pemerintah bapak Sukarwo gubernur, bahwa akan ada pembentukan kopwan, maka LKMM wetan kantor perlu mendapatkan perhatian dari pihak dinas, dan karena LKMM berjalan cukup baik maka supaya mempunyai payung hukum maka didirikan atau dirubah menjadi kopwan Wetan Kantor, itu awal mulanya LKMM menjadi kopwan sehingga LKMM itu sendiri secara otomatis menjadi bubar tetapi keanggotaanya langsung menjadi anggota kopwan Wetan Kantor. Penjelasan Bapak Rohim selaku pengurus koperasi wanita wetan kantor (dalam wawancaranya pada tanggal 26 juni 2014). Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian dari Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Jember LKMM Wetan Kantor sejak berdiri tanggal 4 Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Oktober 2009 berjalan dengan lancar dan berkembang dengan sehat, maka pada tanggal 30 Oktober 2009 LKMM Wetan Kantor meningkat Statusnya menjadi Koperasi Wetan Kantor dengan Nomor Badan Hukum : 518/713.BH/XVI.7/410/2009 tanggal 30 Oktober 2009 (sumber dari koperasi wanita wetan kantor).

4.2.1 Visi, Misi dan Tujuan koperasi wanita wetan kantor

a. *Misi*

Koperasi Yang Dapat Diandalkan Dalam Memberikan Layanan Pembiayaan Kepada Anggota, Serta Mampu Menjadi Integrator Dan Pemercepat Pengembangan Home Industri Di Lingkungan.

b. *Misi*

- 1. Melaksanakan Pembiayaan Usaha Dalam Rangka Membantu Perkembangan Usaha Anggota.*
- 2. Mewujudkan Program Pemerintah Di Bidang Pembiayaan Usaha Mikro Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Ekonomi Rakyat, Serta Menciptakan Lapangan Kerja Dan Pengentasan Kemiskinan.*
- 3. Mengembangkan Industri Keuangan Mikro Yang Efisien Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Dan Kecil.*

c. *Tujuan:*

- 1. Menjadikan Koperasi yang dapat memberikan peningkatan pelayanan pinjaman kepada anggota sesuai dengan tingkat kebutuhan anggota di dalam mengembangkan usahanya.*
- 2. Memberikan pelatihan kepada pengurus dan anggota tentang perkoperasian 1 tahun 2 kali.*

4.2.2 Standar Status Keanggotaan

- a. Koperasi Wanita yang memiliki unit usaha simpan pinjam wajib memiliki prosedur standar pendaftaran anggota.
- b. Calon anggota yang belum memenuhi standar pendaftaran anggota tidak dapat digolongkan sebagai anggota Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam.
- c. Calon anggota pada Koperasi yang memiliki USP paling lambat dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan harus menjadi anggota atau ditolak keanggotaannya.

Sementara untuk pendaftaran anggota sebagai berikut:

- a. Koperasi Wanita Wetan Kantor memiliki ketentuan tertulis mengenai prosedur dan persyaratan bagi seseorang yang akan menjadi anggota dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur standar pendaftaran anggota Koperasi Wanita Wetan Kantor
- b. Seseorang yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur pendaftaran anggota yang telah ditetapkan oleh Koperasi Wanita Wetan Kantor, orang tersebut dapat digolongkan sebagai anggota pada Koperasi Wanita Wetan Kantor

4.2.3 Standar Perlakuan kepada Anggota Baru

- a. Koperasi Wanita Wetan Kantor dengan mempertimbangkan nilai waktu, harus memberikan perlakuan yang sama kepada anggota baru dalam hal :
 - 1) Ketentuan besarnya simpanan pokok.
 - 2) Ketentuan besarnya simpanan wajib.
- b. Ketentuan mengenai kesamaan perlakuan sebagaimana termaksud pada butir c.1) harus dituangkan secara tertulis dan merupakan salah satu kebijakan Koperasi Wanita Wetan Kantor yang disepakati oleh anggota dalam Rapat Anggota;
- c. Selisih besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai konsekuensi butir c.1) diakui sebagai modal penyetaraan anggota baru Koperasi Wanita Wetan Kantor.

Sementara untuk permohonan keluar dari anggota sebagai berikut:

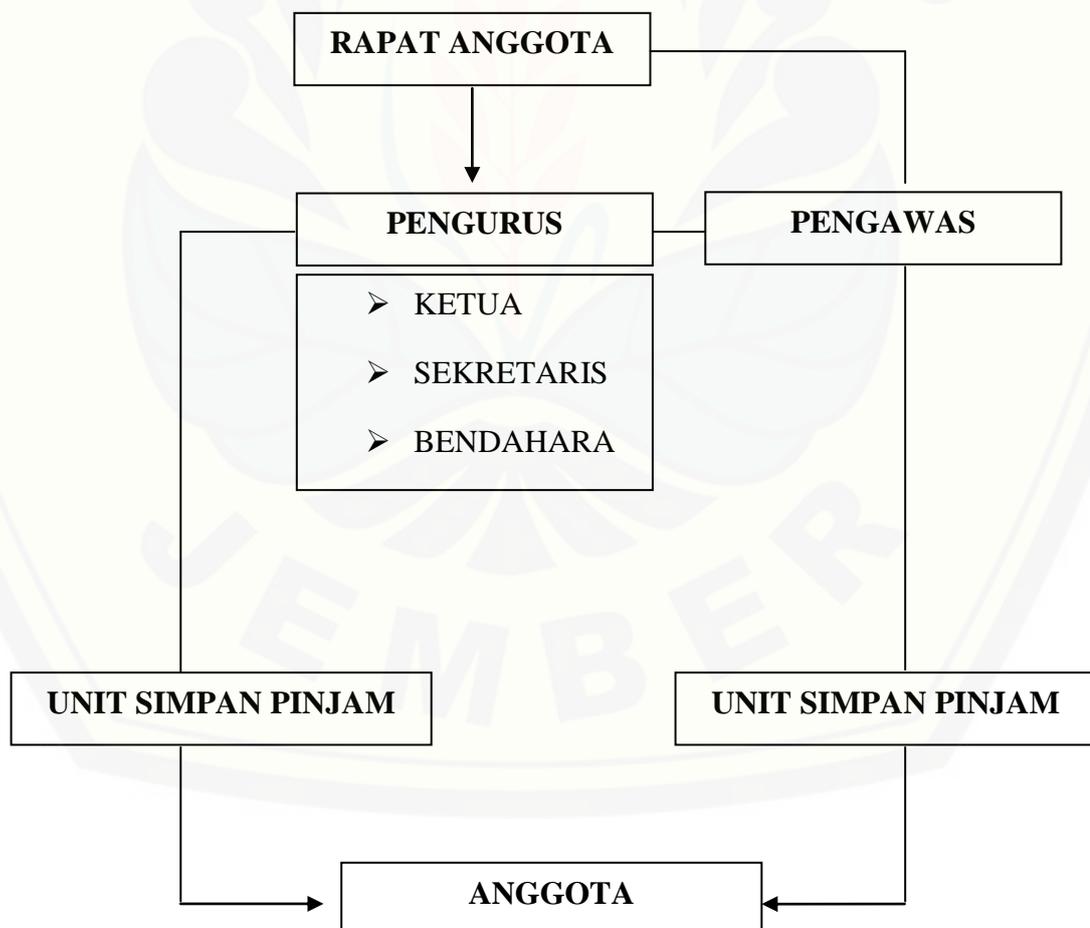
- a. Untuk memperjelas status keanggotaan seseorang, Koperasi Wanita Wetan Kantor memiliki standar operasional prosedur untuk mengatur anggota yang mengajukan permohonan keluar dari keanggotaannya.
- b. Anggota yang akan keluar dari Koperasi Wanita Wetan Kantor yang memiliki jasa transaksi/usaha mempunyai hak untuk memperoleh tambahan atas simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah disetorkannya selama anggota yang akan keluar pada saat pembagian SHU.

- c. Anggota yang akan keluar dari Koperasi yang memiliki jasa transaksi/usaha seperti pada butir 2) di atas adalah anggota yang keluar dengan alasan meninggal dunia atau pindah kerja dan/atau habis masa kerja (bagi koperasi fungsional).
- d. Anggota yang telah memenuhi prosedur standar permohonan untuk keluar dari keanggotaan Koperasi Wanita Wetan Kantor yang memiliki jasa transaksi/usaha maka status keanggotaannya dicabut dan hak serta kewajibannya kepada Koperasi Wanita Wetan Kantor menjadi hilang.

4.2.4 Standar Pengelolaan Organisasi

Koperasi Wanita Wetan Kantor yang memiliki unit usaha simpan pinjam harus mempunyai kelengkapan perangkat organisasi sebagai berikut:

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Koperasi Wanita Wetan Kantor



Koperasi memiliki tiga perangkat organisasi, yaitu Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Tiga unsur ini juga sering disebut sebagai perangkat manajemen koperasi. Fungsi, tugas, dan wewenang tiga perangkat organisasi tersebut sebagai berikut:

a. Rapat Anggota (RA)

Rapat Anggota (RA) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan di koperasi, yang mencerminkan pelaksanaan prinsip demokrasi dalam pengelolaan koperasi. Koperasi wajib menyelenggarakan Rapat Anggota paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Wewenang RA di antaranya adalah menetapkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Menetapkan kebijakan umum Koperasi;
- 2) Mengubah Anggaran Dasar;
- 3) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;
- 4) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- 5) Menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
- 6) Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- 7) Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;
- 8) Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan
- 9) Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Jenis Rapat Anggota dan kuorum yang disyaratkan adalah sebagai berikut.

- 1) Rapat Anggota Tahunan, kuorumnya dihadiri minimal $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota (yang terdaftar dalam Buku Daftar Anggota).
- 2) Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan, Peleburan, dan Pembagian, kuorumnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota.

- 3) Rapat Anggota Pembubaran, kuorumnya dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota. Apabila tidak mencapai kuorum pada poin 1) dan 2) RA ditunda, apabila sampai dua kali penundaan belummenyampai kuorum, maka penyelenggaraan RA dapat menetapkan kuorum dengan meminta persetujuan Panitera Pengadilan Negeri setempat.
- 4) Rapat Anggota Luar Biasa dan kelompok, dinyatakan kuorum apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf 1), 2), dan 3).

b. Pengurus

Pengurus koperasi adalah pemegang kuasa RA untuk mengelola koperasi, artinya Pengurus hanya boleh melakukan segala macam kreasi manajemen yang tidak keluar dari koridor keputusan RA. Pengurus merupakan pimpinan kolektif tidak berdiri sendiri, dan mempunyai pertanggungjawaban bersama. Orang perseorangan harus memenuhi persyaratan:

- 1) Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- 2) Memiliki kemampuan mengelola usaha koperasi;
- 3) Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
- 4) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan

Tugas Pengurus koperasi adalah:

- 1) Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;
- 2) Mendorong dan memajukan usaha Anggota;
- 3) Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
- 4) Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
- 5) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;

- 6) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- 7) Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
- 8) Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan
- 9) Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota

Wewenang Pengurus koperasi:

- 1) Mewakili koperasi di dalam dan di luar koperasi.
- 2) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi.
- 3) Memutuskan penerimaan anggota dan pemberhentian anggota sesuai ketentuan AD/ART.

c. Pengawas

Pengawas dipilih oleh RA dan bertanggung jawab terhadap RA. Keberadaan Pengawas pada hakikatnya adalah untuk menjaga kepemimpinan pengurus agar segala keputusan dan tindakannya selalu diorientasikan pada keputusan koperasi yang telah dilakukan dalam Rapat Anggota. Pengurus berfungsi mengembangkan organisasi dan usaha koperasi, sedangkan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan guna menjaga kepemimpinan Pengurus sebagaimana dijelaskan di atas.

Tugas Pengawas koperasi sebagai berikut.

- 1) Mengusulkan calon pengurus;
- 2) Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus; dan
- 4) Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota

Pengawas koperasi berwenang sebagai berikut.

- 1) Menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;

- 2) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;
- 3) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus;
- 4) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan
- 5) Dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

Pengurus dan pengawas memiliki peran yang sangat penting dalam rangka berjalannya koperasi wanita. adapun susunan pengurus dapat dilihat pada tabel 4.5 Berikut ini.

Tabel 4.5 Susunan Pengurus Koperasi Wanita Wetan Kantor

No	Nama	Jabatan
1	Soleha	Ketua
2	Siti Husnul Z	Sekretaris
3	Atik	Bendahara
4	Ahmad Taufik	Bagian simpan pinjam
5	Martam	Pengawas I
6	Ahmad Rohim	Pengawas II

Sumber: Koperasi Wanita Wetan Kantor

4.2.5 Standar Penghimpunan Dana

1. Koperasi Wanita Wetan Kantor hanya melakukan penghimpunan dana dari pemerintah dan para anggota.
2. Penghimpunan dana dari calon anggota Koperasi Wanita Wetan Kantor atau dari koperasi lain harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Anggota.
3. Koperasi Wanita Wetan Kantor menghimpun dana melalui tabungan, simpanan pokok dan wajib, dan simpanan sukarela (bersifat tidak memaksa).

4. Tingkat bunga tabungan atau simpanan untuk anggota ditentukan dengan metode saldo rata-rata.
5. Tingkat balas jasa untuk penyertaan (simpanan pokok dan simpanan wajib) ditentukan dengan metode indeks pembagiaan SHU atas dasar transaksi.

Setelah dana dihimpun kemudian disalurkan sebagai berikut:

1. Penyaluran dana Koperasi Wanita Wetan Kantor diberikan dalam bentuk pinjaman kepada anggota.
2. Koperasi Wanita Wetan Kantor menyalurkan pinjaman berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan selalu mempertimbangkan bahwa:
 - a. Pemberian pinjaman akan memberi manfaat kepada yang menerima, dan
 - b. Pihak koperasi mempertimbangkan bahwa pinjaman dapat dibayar kembali oleh peminjam sesuai dengan perjanjian.
3. Kebijakan mengenai jumlah pinjaman yang dapat diberikan oleh Koperasi Wanita Wetan Kantor kepada anggota harus memperhatikan hal-hal berikut.
 - a. Pemanfaatan pinjaman oleh calon peminjam.
 - b. Kemampuan calon peminjam untuk membayar kewajibannya.
 - c. Likuiditas koperasi (kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban atau hutang yang segera dibayar dengan harta lancarnya) dengan mempertimbangkan cadangan kas primer dan sekunder.
4. Koperasi Wanita Wetan Kantor menetapkan plafon pinjaman tertentu berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
5. Jika Koperasi Wanita Wetan Kantor memiliki kelebihan dana setelah anggota mendapat pelayanan sepenuhnya, maka pengelola Koperasi dapat melayani calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya dengan tujuan untuk memanfaatkan kelebihan dana yang menganggur.

4.2.6 Standar Persyaratan Calon Peminjam

Koperasi Wanita Wetan Kantor memberikan pinjaman dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Anggota (calon peminjam) bertempat tinggal di wilayah jangkauan pelayanan Koperasi.
2. Anggota (calon peminjam) mempunyai usaha/penghasilan tetap.
3. Anggota (calon peminjam) tidak memiliki tunggakan (kredit bermasalah) dengan Koperasi maupun pihak lain.
4. Anggota (calon peminjam) tidak pernah tersangkut masalah pidana.
5. Anggota (calon peminjam) memiliki karakter dan moral yang baik.
6. Anggota (calon peminjam) harus ada tanda tangan suami / ahli waris.
7. Anggota (calon peminjam) telah mengikuti program pembinaan pra penyaluran pinjaman.

Plafon pinjaman untuk koperasi Wetan Kantor adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Wanita Wetan Kantor menetapkan besarnya nilai pinjaman minimal sebesar Rp. 500.000,- dan besarnya nilai pinjaman maksimum sebesar Rp. 5.000.000,-, baik untuk pinjaman produktif maupun pinjaman konsumtif, yang dapat diberikan melalui Rapat Anggota.
2. Pemberian pinjaman produktif didasarkan pada kelayakan usaha calon peminjam.
3. Pemberian pinjaman konsumtif didasarkan nilai simpanan dan atau cicilan kredit per periode (bulan), dan penghasilan calon peminjam.

Sementara untuk standar biaya pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Dalam menangani pinjaman bermasalah, Koperasi Wanita Wetan Kantor memperhatikan prinsip-prinsip berikut:
 - a. Keterbukaan.
 - b. Tanggung jawab bersama dan solidaritas anggota.
 - c. Pembinaan yang berkelanjutan kepada anggota.
 - d. Efisiensi dengan memperhatikan prinsip bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan

4.2.7 Standar Operasional Pembagian SHU

- a. SHU tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan AD/ART.
- b. Dalam hal pembagian SHU belum diatur dalam AD/ART, maka keputusan pembagian SHU harus menunggu keputusan Rapat Anggota.
- c. Pembagian dan penggunaan SHU harus diputuskan dalam Rapat Anggota, pembagian tersebut setelah dikurangi dengan cadangan digunakan sesuai dengan kebutuhan antara lain:
 - 1) Dibagikan kepada anggota secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - 2) Dibagikan kepada anggota untuk balas jasa yang terbatas terhadap modal yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib.
 - 3) Dibagikan sebagai keuntungan kepada pemegang surat perjanjian modal penyertaan.
 - 4) Dana pendidikan dan pelatihan serta peningkatan keterampilan bagi pengurus, pengawas, pengelola, karyawan dan anggota.
 - 5) Insentif bagi pengelola dan karyawan.
 - 6) Keperluan lain yang menunjang kegiatan Koperasi .

4.3 Hasil Dari Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor.

Pelaksanaan Pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor adalah dengan cara memberikan akses permodalan bagi pemilik usaha mikro khususnya untuk kaum perempuan dalam bentuk simpan pinjam. Akses permodalan bagi perempuan pengusaha mikro menjadi sangat penting karena tidak satupun lembaga keuangan yang bisa mereka akses, lembaga keuangan mikro memungkinkan mereka dapat memperoleh akses keuangan yang mudah.

Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor dapat melihat banyaknya manfaat yang diperoleh para perempuan pengusaha mikro dalam mengembangkan usahanya karena dengan adanya koperasi wanita mereka dengan mudah memperoleh akses permodalan. Mereka dapat meminjam tanpa perlu

memusingkan agunan layaknya bank-bank konvensional, dan tidak perlu meminjam dana dari bank harian atau rentenir karena biaya jasa di koperasi lebih rendah. Ada beberapa tahap pelaksanaan yang harus di laksanakan dalam mendapatkan modal di Koperasi Wanita Wetan Kantor yaitu terdiri dari :

4.3.1 Segmentasi Peminjam

Ada beberapa tahap dalam melakukan pinjaman pada koperasi wanita wetan kantor seperti yang tertulis pada SOP (Standart Operasional Prosedur). ini merupakan tahap awal koperasi untuk memberikan pinjaman kepada anggotanya, menurut Ibu Soleha (dalam wawancaranya tanggal 27 maret 2015) Beliau selaku Ketua Koperasi Wanita Wetan Kantor menjelaskan bahwa:

“untuk menjadi anggota kopwan Wetan Kantor diutamakan adalah seorang wanita karena Koperasi Wanita dan mempunyai Usaha, dan apabila dia belum mempunyai usaha tapi berkeinginan untuk membuka usaha dia bisa dimasukkan menjadi anggota. kopwan Wetan Kantor sistemnya tanggung renteng artinya maka setiap anggota harus mempunyai kelompok-kelompok maksimal lima, minimal tiga orang Penentuan pinjaman dibidang jasa dikaitkan dengan kemampuan koperasi dalam memberikan pinjaman yang kas-nya belum bisa memenuhi untuk kebutuhan pedagangan yang memerlukan modal besar. Terdapat dua program untuk pinjaman anggota, selain system pembayaran secara mingguan juga ada system pembayaran secara bulanan”

Penjelasan di atas mengandung pengertian bahwa pinjaman akan dicairkan jika telah memenuhi kriteria usaha yang ditentukan oleh koperasi yaitu usaha produktif. Pemilihan usaha sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pencairan kredit berkaitan dengan kemampuan peminjam adalah mengembalikan atau mengangsur modal pinjamannya. Lebih lanjut Ibu Soleha menjelaskan (dalam wawancaranya tanggal 27 maret 2015) bahwa:

“koperasi memberikan pinjaman kepada perorangan dan kelompok yang memiliki kemampuan untuk mengembalikan atau minimal mereka memiliki penghasilan. Koperasi dengan lembaga lainnya sedikit ada perbedaan mbak, disini ada simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan suka rela, siapa saja boleh mengajukan pinjaman baik itu kelompok atau perorangan dengan kriteria yang telah ditentukan oleh koperasi.”

Koperasi Wanita wetan kantor memberikan bantuan permodalan melalui pinjaman kepada para anggotanya baik perorangan atau kelompok. jika kelompok maka koperasi menerapkan sistem tanggung renteng, sistem ini dinilai efektif dalam meminimalisir angka kejadian pinjaman macet.

Besarnya pinjaman awal para pelaku usaha sangat beragam tergantung jenis usahanya. Berikut hasil wawancara dengan peminjam di koperasi Wetan Kantor:

Ibu Kapti jenis usaha adalah prancangan (wawancara tanggal 29-03-2015)

“setelah saya menjadi anggota saya mendapatkan pinjaman itu 300.000 paling besar 800.000 dana tersebut saya gunakan untuk membuka prancangan itung-itung buat membantu ekonomi keluarga. Saya ambil yang mingguan lebih enak dan cepet mengembalikannya”

Ibu Sumila jualan bakso (usaha tidak tetap) (wawancara tanggal 29-03-2015)

“mendapatkan pinjaman sebesar 700.000 dana tersebut akhirnya saya pergunakan untuk jualan bakso lagi,

Ibu Sulasmina (Ketua Kelompok) Jenis Usaha adalah Laundry (wawancara tanggal 30-03-2015)

“Modal awal saya 300.000 sampek 1000.000 gitu, paling sayang melakukan pencairan itu sekarang ada kalau 50x saya lupa, ya saya pergunakan untuk pemula usaha laundry juga, uang dari koperasi saya pergunakan untuk menambahi buat beli mesin cuci itu kan mahal mbak, hahaha, kaang-kadang saya ambil mingguan dan ada juga yang bulanan tergantung kondisi usaha dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman tersebut”

Ibu Misnaton jenis usaha aksesoris (souvenir) (wawancara tanggal 29-03-2015)

“awalnya saya mendapatkan pencairan sekitar 100.000 soalnya usaha saya tergantung pesanan mbk, modal saya sebenarnya sebesar 500.000 itu, ya itung-itung itu buat tambahan modal 500.000 itu aja belum diperkirakan kalau barang naik, saya pinjam dikoperasi buat tambah-tambahan modal

mbak, souvenir yang saya jual harganya sekitar 3500. 5000, 10.000 tetapi yang banyak diminati harganya 3500. Saya mengangsur tiap minggu mbak, saya membayar angsuran pokok dan jasanya, kadang-kadang saya nabung mbak”

Ibu Ifa (jenis usaha makan ringan) wawancara tanggal 30-30-2015

“gak tentu seh mbak, tergantung permintaan kalau saya awalnya 2000.000 kalau saya butuh dana untuk usaha saya ya saya pinjam lagi kayak itu contoh ada pesanan makanan, tergantung kebutuhan seh..... modal usaha ya gak satu aja mbk, ya tergantung usaha mana yang jalan, saya kan jualan makanan ya tergantung kesukaan anak-anak saja, kalau ada pesanan ya saya terima, tapi kalau kayak mie, rujak, mie kopyok saya tetep jual itu, kadang ya kesukaan anak-anak cilok atau apa ya saya buat tergantung se mbk, tapi gak menetap itu-itu aja... saya ambil yang mingguan, perputaran uang lebih cepat, ya sebenere tergantung pasar sih”

Wawancara dengan ibu Yuni Sulastri (selaku ketua kelompok) jenis usaha jualan nasi kotak wawancara tanggal 29-02-2015

“saya dapatkan sebesar 1000.000 untuk lima orang itu (pencairan awal) tapi dulu saya melakukan pengajuan permohonan usaha itu untuk tambahan usaha, bukan untuk modal usaha soalnya sebelum menjadi anggota saya sudah mempuyai usaha mbk, yaitu jualan makanan seperti mie kopyok sama bakso itu wes,soale kalau awal pertama mengajukan pinjaman,di tanya untuk apa, ya saya bilang untuk tambahan modal usaha saya,kan saya emang dari awal punya usaha, kalau sekarang ya jualan nasi kotak (menerima pesanan) sama nasi bungkus. Saya ambil yang mingguan, dan tidak pernah ambil yang bulanan mbak. Punya tanggungan itu tidak enak mbak harus cepat diselesaikan”

Wawancara dengan ibu nurjiatin atau ibu nurjiatin tanggal 29-03-2015 (jualan minuman, amsle, ronde)

“saat ini saya menjadi anggota koperasi dan saya mendapatkan pinjaman 2000.000 jujur ya mbak dana tersebut tidak saya pergunakan untuk usaha saya, saya buat kebutuhan anak,saya kan punya anak kuliah juga. Saya ambil yang bulanan untuk pinjaman ini, namun pada pinjaman lainnya saya lebih sering mingguan mbak”

Wawancara dengan ibu Legiwati pemilik kios (jualan rokok) tanggal 30-03-2015)

“saya dulu awalnya cuman dapat 200.000 itu sebenarnya cuman saya buat usaha jualan krupuk...terus saya bisa mendapatkan pencairan lagi sekitar

800.000 gitu ya saya buat jualan rokok ini mbk, di halte depan mbak kiosnya, ya sama makanan cemilan. Tiap minggu saya nyetornya mbak”

Wawancara dengan ibu Siti Khusnul Z selaku pengurus dan ibu RT di lingkungan wetan kantor (usaha sebagai penjahit), tanggal 29-03-2015

“awalnya saya melakukan pencairan sekitar 300.000 kalau akhir ini ya sekitar 700.000 saya juga gak banyak-banyak mbak, soale kan saya gak butuh banyak, saya ambil yang mingguan mbak”

Ibu Mina beliau jenis usaha beliau adalah Mlijo (wawancara tanggal 30-03-2015)

“Modal awalnya cukup sedikit mbk, sekitar 300.000 buat modal awal, sekarang saya bisa mendapatkan pencairan sampek 1000.000 pernah saya.. untuk jenis pinjamannya saya ambil yang mingguan mbak, lebih cepat, karena punya hutang itu tidak enak”

Berdasarkan seluruh wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pencairan pinjaman tiap pelaku usaha tidak sama tergantung dari kebutuhan dan penggunaannya modal itu untuk apa saja. Selain itu pertimbangan lain yang digunakan koperasi adalah prestasi peminjam jika masih awal meminjam maka pencairan relative kecil namun jika sudah memiliki prestasi bagus jumlah pinjaman bisa meningkat. Sementara untuk jenis pinjaman yang dominan di ambil oleh pelaku usaha adalah mingguan, dengan alasan yang beragam pula.

Secara lebih detail mengenai tahap pencairan awal bagi anggota koperasi wanita Wetan Kator sebagai berikut:

Tabel 4.6 Modal Awal yang Diterima Kelompok Anggota Kopwan Wetan Kantor

No	Nama	Jenis usaha	Modal awal
1	Kapti	Pracangan	Rp. 300.000
2	Sulasmina	Laundry	Rp. 300.000
3	Sumila	Bakso(usaha tidak tetap)	Rp. 700.000
4	Misnaton	Aksesoris(sovenir)	Rp. 100.000
5	Ifa	Makanan Ringan	Rp. 2000.000
6	Yuni Sulastri	Nasi Kotak	Rp. 1.000.000
7	Muhammad	Minuman	Rp. 2.000.000

	Syukur		
8	Legiwati	Jualan Rokok	Rp. 200.000
9	Siti Khusnul Z	Penjahit	Rp. 300.000
10	Mina	Mlijo	Rp. 300.000

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata anggota kelompok mendapatkan pinjaman atau modal awal sebesar Rp. 300.000. namun jumlah pinjaman dapat meningkat sesuai dengan perkembangan usaha mereka. jika anggota bisa mengembangkan usaha nya dengan baik dan bisa mengembalikan modal tidak telat dan tidak macet maka kemungkinan besar jumlah modal pinjaman dapat dinaikkan.

4.3.2 Tata Cara Permohonan Pinjaman

Hal ini adalah tahap awal yang harus di perhatikan oleh calon anggota,yaitu diawali dengan mengajukan permohonan pinjaman kepada bagian Unit Simpan Pinjam (USP), adapun hal-hal yang perlu diperhatikan calon peminjam pada saat pengajuan dan permohonan pinjaman diantaranya adalah: mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan pengajuan pinjaman apabila data telah disetujui calon anggota akan di survei dan dana pinjaman akan cair dalam waktu satu minggu setelah dilakukan survei. Menurut Ahamad Taufik selaku bidang Simpan Pinjam (dalam wawancaranya tanggal 02-04-2015) menjelaskan bahwa:

“Ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan oleh calon anggota maupun yang sudah menjadi anggota untuk melakukan pinjaman, yang pasti mereka datang kemari dan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan beberapa persyaratan seperti fotokopi KTP yang masih berlaku. Selain itu peminjam harus melakukan simpanan pokok untuk anggota yaitu sebesar 100.000, kemudian pihak kami mencari informasi dengan menanyakan beberapa hal kepada peminjam terkait dengan penggunaan dana tersebut, jika itu peminjam baru maka kami terjun kelapangan untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan sementara jika sudah menjadi anggota dan memiliki prestasi baik maka cukup dengan wawancara saja.kita juga mengenakan biaya administrasi sebesar 3% dari total pinjaman. Terus adalagi yang meminjam tidak boleh diwakilkan ketika melakukan pencairan pinjaman.

Penjelasan di atas mengandung pemahaman bahwa dalam proses pengajuan pinjaman tidaklah semudah seperti yang dibayangkan melainkan melalui beberapa tahapan yang harus diselesaikan. Di Koperasi Wanita Wetan Kantor pengajuan pinjaman dikenakan biaya untuk jasa sebesar 1,5% dan untuk administrasi sebesar 3% dari total pinjaman. Seandainya anggota pinjam uang 1000.000 maka tidak akan diterima secara utuh melainkan dipotong biaya administrasi 30.000, dan simpanan pokok. Pemberlakuan peraturan ini sesuai dengan hasil Rapat anggota tahunan. Kemudahan dalam memperoleh pinjaman tergantung dari kelengkapan persyaratan dan kriteria peminjam, jika prestasi peminjam bagus dan pesyaratannya lengkap maka pencairan bisa segera dilakukan. Sementara untuk pemula artinya baru pinjam maka akan dilakukan analisis pinjaman. Hal ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui karakteristik peminjam dan jenis usahanya. Analisis ini dilakukan untuk memperkecil adanya kredit macet. Menurut Ahmad Taufik selaku bidang simpan pinjam (dalam wawancaranya 02-04-2015) menjelaskan bahwa:

“setelah data dari peminjam dipelajari akan menghasilkan dua keputusan yaitu diberikan pinjaman atau tidak, jika setuju untuk dicairkan maka pihak kami menerbitkan surat tertulis bahwa pengajuan tersebut disetujui untuk dicairkan”

Setelah melakukan rapat atau koordinasi antara bendahara dan ketua koperasi dan mencapai suatu keputusan mengenai kredit yang mana saja yang akan direalisasikan, maka bagian Unit Simpan Pinjam (USP) mengeluarkan keputusan yang didalamnya terdapat daftar permohonan kredit yang formulir kreditnya telah ditanda tangani oleh ketua koperasi dan bendahara USP yang menandakan bahwa kredit itu telah disetujui dan siap untuk dicairkan.

Keputusan untuk menerima dan menolak harus melalui atau mengetahui pengurus. Hasil evaluasi bidang simpan pinjam akan melaporkan temuan dilapangan kepada pengurus kemudian pengurus akan membahas temuan tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Hasil pengkajian itu akan menghasilkan keputusan

diterima atau ditolak pengajuan pinjaman tersebut. jika diterima maka pengurus akan menerbitkan surat keterangan disetujui dan sebaliknya jika ditolak maka pengurus akan mengirimkan surat kepada calon peminjam.

Prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kepada peminjam memang perlu untuk dipertahankan, mengingat koperasi adalah bersumber dari simpanan anggota yang suatu saat akan dikembalikan jika anggota berencana berhenti menjadi anggota koperasi. Uang dioperasikan adalah uang anggota dari simpanan pokok dan simpanan sukarela, jika sampai terjadi kredit sendiri.

4.3.3 Limit Pinjaman

Limit pinjaman merupakan maksimal pengeluaran kas terhadap pinjaman kepada anggota. Setiap lembaga memiliki kebijakan masing-masing dalam memberikan batas maksimal pinjaman. Hal ini sangat tergantung kondisi kesehatan lembaga tersebut. koperasi yang dominan sumber modalnya dari anggota yang relative kecil memungkinkan akan berbeda batasan pinjaman maksimal kepada peminjam. Batasan pinjaman di Koperasi Wanita Wetan Kantor sebesar 2.500.000 seperti yang disampaikan oleh Ibu Soleha (dalam wawancaranya tanggal 27-03-2015):

“kami memiliki perhitungan resiko tersendiri mbak agar nantinya tidak terjadi masalah dikemudian hari, namun kepastian pemberian pinjaman dalam jumlah besar kita harus mengetahui kemampuan orang tersebut, misalnya jarang telat ketika melakukan angsuran dan sebagainya. Mengacu pada hasil RAT tahun 2014 maka besar pinjaman yang bisa diberikan sebesar 2500.000 per anggota itupun masih dilihat prestasi, besar simpanannya dan pertimbangan yang lain”

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ahmad Taufik selaku bidang simpanan pinjam (dalam wawancaranya tanggal 02-04-2015) menjelaskan bahwa:

“kami memberikan pinjaman sesuai dengan kemampuan si anggota dan dipergunakan untuk apa? tidak mungkin untuk gorengan misalkan memerlukan dana pinjaman yang besar, jadi besarnya pinjaman ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kegunaannya serta kelayakan usaha peminjam. Pertimbangan lain yang dijadikan acuan adalah jumlah simpanan peminjam dikoperasi jika simpanannya banyak maka tidak menutup kemungkinan bisa mencairkan pinjaman dengan jumlah yang diinginkan peminjam, sebaliknya jika simpanan sukarela sedikit maka kami juga perlu memperhitungkannya kembali”

Menurut Ibu Legiwati salah jenis usaha ibu legiwati kios rokok (dalam wawancaranya tanggal 30-03-2015) menjelaskan bahwa:

“tidak semua pinjaman dapat dicairkan, saya dulu awalnya cuman 200.000, setelah usaha saya bisa lancar, pinjemnya sampek 1.200.000”

Dalam prosedur pemberian kredit kopwan Wetan Kantor dilakukan melalui langkah-langkah yang sangat membantu dalam pelaksanaan pemberian kredit serta mengatasi masalah yang timbul khususnya bagi pengurus Unit Simpan Pinjam (USP) dalam menyetujui atau tidak permohonan kredit anggota yang mengajukan pinjaman kredit tersebut. Sedangkan yang menjadi ketentuan atau pertimbangan dalam pelaksanaan pemberian kredit anggota yang dilaksanakan dengan ketentuan umum yaitu dengan ditentukannya berdasarkan besar simpanan anggota.

4.3.4 Biaya Pinjaman

Administrasi pinjaman bertujuan untuk mendukung langkah-langkah pembinaan atau penilaian atas perkembangan pinjaman yang telah diberikan atau perkembangan usaha anggota atau dan pengawas, sehingga kepentingan koperasi terlindungi. Setiap tahapan dalam proses pemberian pinjaman harus diadministrasikan secara tertib, mulai dari tahap permohonan, tahap prakarsa dan analisis pinjaman, tahap rekomendasi pinjaman, tahap putusan pinjaman, tahap pencairan pinjaman, tahap pembinaan pinjaman, tahap angsuran sampai pelunasan pinjaman, tahap penyelamatan pinjaman bermasalah sampai tahap penghapusbukuan pinjaman macet harus diadministrasikan secara tertib dalam registernya masing-masing.

Biaya administrasi diperuntukkan sebagai biaya ganti rugi atas adanya transaksi pinjaman. Biaya ini pemotongannya di awal pada saat melakukan pinjaman. Di Kopwan Wetan Kantor menurut Soleha (dalam wawancaranya tanggal 27-03-2015) menjelaskan bahwa:

“Untuk peminjam akan dikenakan beberapa biaya seperti biaya administrasi sebesar 3%, bunga untuk pinjaman sebesar 1,5%. jadi angsuran peminjam akan tetap selama 10 kali angsuran”

Biaya ini sedikit menimbulkan kekecewaan peminjam karena terlalu besar potongan yang diberikan. Soalnya pihak koperasi tidak mau tahu apakah usahanya berjalan lancar atau tidak, seperti yang disampaikan Ibu Kusnul (dalam wawancaranya tanggal 29-03-2015) mengatakan bahwa:

“setiap pinjam di koperasi tidak utuh seratus persen seperti yang ada dipengajuan pinjaman tapi ada beberapa biaya yang dikenakan kepada peminjam, tapi enak nya di koperasi itu ketika kita belum bisa ngangsur, pihak koperasi tidak terlalu memaksa, misalnya harus ada jaminan, tidak ya, kita bilang maaf bu, minggu ini saya gak ngangsur dulu, pasti pihak koperasi memahami, beda kalau sudah kenak rentenir kita kalau gak bisa bayar harus sembunyi-sembunyi gitu”

Pada intinya adanya *Koperasi Wanita ini sangat membantu pemilik Usaha Mikro untuk mengembangkan Usaha mereka, dalam penjelasan yang di sampaikan ibu husnul jelas sudah bedanya koperasi dengan rentenir.*

4.3.5 Analisis Pinjaman

Penilaian atau analisis pinjaman adalah semacam studi kelayakan (*feasibility Study*) atas perusahaan pemohon pinjaman. Penilaian pinjaman adalah Suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas/surat/data permohonan pinjaman calon peminjaman hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah pinjaman tersebut diterima atau ditolak.

Di Koperasi Wetan Kantor dalam pelaksanaan pemberian pinjaman selalu mempertimbangkan berbagai hal yang terkait, agar pinjaman yang akan dipinjamkan dapat memiliki manfaat dan tidak merugikan bank maupun debitur di masa depan. Koperasi wetan kantor memephratkan baberapa hal dalam memberikan pinjman seperti keamanan kredit (*safety*), terarahnya tujuan penggunaan kredit (*suitability*), dan menguntungkan (*profitable*). Analisis pinjaman diperlukan agar Koperasi Wanita Wetan Kantor memperoleh keyakinan

bahwa pinjaman yang diberikan dapat dikembalikan oleh debiturnya, menguntungkan koperasi untuk kesejahteraan anggota. Pada dasarnya terdapat 2 aspek yang dianalisis, menurut Ahmad Taufik (dalam wawancaranya tanggal 02-04-2015) menjelaskan bahwa:

“Setiap peminjam tidak serta merta langsung mendapatkan pencairan, namun selebihnya kami analisis terlebih dahulu karakteristik peminjam, hal ini dilakukan untuk menekan terjadinya pinjman macet, jika pinjaman macet maka kita sendiri yang rugi, sehingga diperlukan analisis pinjaman. Ke-dua analisis yang biasa kami lakukan yaitu analisis kualitas peminjam meliputi karakter, dan komitmen yang diberikan yang berkaitan dengan kesanggupan dalam melakukan angsuran pinjaman.”

Analisis pinjaman penting untuk dilakukan untuk mengurangi resiko pinjaman macet. Analisis ini sebagai ujung tombak koperasi dalam memberikan putusan pinjaman. Menurut Ibu Misnaton jenis usaha aksesoris (souvenir) (wawancara tanggal 29-03-2015) mengatakan bahwa:

“pas baru mengajukan saya ditanyai macem-macam dari usaha dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman tersebut,”

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Sulastri (selaku ketua kelompok) jenis usaha jualan nasi kotak (dalam wawancara tanggal 29-03-2015) mengatakan bahwa:

“awalnya sih memang agak ketat pemberian pinjaman karena mungkin untuk menghindari kemacetan dikemudian hari, saya tiap mengajukan pinjaman dulu tidak langsung cair masih melalui beberapa tahapan, masih ditanyai usahanya apa, pinjmannya berapa, terus banyak lagi pertanyaannya saya jawab aja, untuk tambahan usaha gitu”

Mutu permintaan kredit dapat diukur dari prospek kemampuan dan kesediaan calon peminjam melunasi kredit sesuai dengan isi perjanjian kredit. Pengajuan kemampuan dan kesediaan calon peminjam melunasi kredit dipengaruhi faktor internal dan eksternal bank yang dicakup dalam The Five C's of Credit Analysis yang merupakan tahap penting dalam kualifikasi pemberian kredit.

1. Character

Merupakan data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan janji yang telah ditetapkan. Pemberian kredit atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari.

2. *Capacity*

Capacity dalam hal ini merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Jadi jelaslah maksud penilaian dari terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Mulyono,1993). Pengukuran *capacity* dari calon debitur dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.

3. *Capital*

Adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, *ratio-ratio* keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari

kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

4. *Collateral*

Adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Collateral diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. Pada hakikatnya bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan bisa juga collateral tidak berwujud, seperti jaminan pribadi (*bortogch*), letter of guarantee, rekomendasi

5. *Condition of Economy*

Kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur. Permasalahan mengenai Condition of economy erat kaitannya dengan faktor politik, peraturan perundang-undangan negara dan perbankan pada saat itu serta keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran seperti Gempa bumi, tsunami, longsor, banjir dsb. Sebagai contoh beberapa saat yang lalu terjadi gejolak ekonomi yang bersifat negatif dan membuat nilai tukar rupiah menjadi sangat rendah, hal ini menyebabkan perbankan akan menolak setiap bentuk kredit investasi maupun konsumtif.

4.3.6 Pembinaan Terhadap Pinjaman

Pembinaan pinjaman adalah upaya pembinaan yang berkesinambungan dan dilakukan koperasi yang berwenang terhadap fasilitas pinjaman yang menyangkut penilaian perkembangan usaha peminjam, penggunaan pinjaman maupun perlindungan kepentingan koperasi baik yang dilakukan secara administratif maupun lapangan. Tujuan dilakukan pembinaan pinjaman adalah untuk menjaga agar pelaksanaan pencairan pinjaman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, penggunaan pinjaman sesuai dengan rencana atau tujuan

pinjaman, pengeluaran dan pendapatan peminjam benar-benar dipergunakan untuk membayar kembali pinjamannya, dan untuk mengikuti perkembangan usaha anggota dan membantu memecahkan permasalahannya serta untuk mengamankan pinjaman sehingga dapat menghindarkan terjadinya penurunan pinjaman macet.

Selanjutnya pembinaan kredit dapat dilakukan melalui pembinaan secara administratif dan pembinaan secara langsung di lapangan. Pembinaan secara administratif dilakukan di belakang meja berdasarkan pada laporan-laporan/surat-menyurat dari peminjam, yang mencakup analisis laporan yang diterima dari peminjam, mengambil langkah-langkah untuk bahan kegiatan di lapangan, memberikan informasi perkembangan pinjamannya dan meminta tindakan segera. Sedangkan pembinaan di lapangan dilakukan dengan mengadakan kunjungan ke tempat usaha peminjam, yang meliputi penelitian apakah pinjaman yang diberikan telah dipergunakan sesuai dengan syarat dan tujuan yang telah disepakati, mengadakan pengamatan apakah manajemen perusahaan terpelihara dengan baik, meneliti samapai seberapa jauh kemungkinan pengembangan perkreditan di sektor usaha anggota yang bersangkutan. Koperasi melakukan pembinaan terhadap peminjam menurut Bapak Rohim selaku pengawas koperasi wanita wetan kantor (dalam wawancaranya tanggal 06-04-2015) menjelaskan bahwa:

“meski pihak kami telah hati-hati dalam melakukan pemberian pinjaman, namun nyatanya masih banyak peminjam yang nakal, telat dan sebagainya. Biasanya pihak kami selalu memberitahu kepada peminjam mengenai jatuh tempo angsuran melalui sms, memberikan teguran secara lisan kepada peminjam yang sering telat membayar, dan memberikan beberapa solusi jika peminjam mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjamannya.”

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ibu Soleha selaku pengurus Koperasi Wetan Kantor (dalam wawancaranya tanggal 27-03-2015) mengatakan bahwa:

“beberapa langkah yang telah kami lakukan dalam bentuk pembinaan terhadap pinjaman, beberapa anggota yang tidak melakukan angsuran selalu kami tegur secara lisan, setiap kali mereka terlambat selalu mendapatkan teguran dari kami. Ada kejadian dulu anggota pindah keluar

kota sementara kewajiban di koperasi belum selesai, ya pihak kami terus menanyakan dan meminta untuk segera menyelesaikan kewajibannya”

Dari kedua pernyataan di atas mengandung pengertian bahwa koperasi telah melakukan pembinaan terhadap pinjaman anggota yang belum memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Sulasmina (Ketua Kelompok) Jenis Usaha adalah Laundry (wawancara tanggal 30-03-2015) mengatakan bahwa:

“saya sebagai ketua kelompok sudah sangat sering mendapatkan teguran dari koperasi perihal kelompok saya yang terlambat melakukan angsuran. Masalahnya kelompok peminjam bersifat tanggung renteng, jika satu bermasalah maka akan bermasalah pada yang lainnya, kalau ada yang tidak bayar maka tidak akan mendapatkan pinjaman lagi untuk anggota yang lainnya”

Tanggung Renteng adalah tanggung jawab bersama diantara anggota disatu kelompok, atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai Kelompok adalah pengelompokan anggota dalam jumlah tertentu berdasarkan tempat tinggal yang berdekatan. Dalam koperasi yang menerapkan system tanggung renteng, kelompok merupakan basic dari pengelolaan koperasi. Karena didalam kelompoklah, semua aktivitas anggota terkait dengan koperasi, dilakukan. Semua aktivitas tersebut yang terkait dengan pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cara musyawarah. Pola pengambilan keputusan demikian dilakukan, karena semua konsekuensi dari keputusan tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota dalam kelompok. Dengan kata lain, eksistensi sebuah kelompok menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota dikelompok tersebut.

4.3.7 Dokumentasi

Dokumentasi pinjaman atau kredit adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka pemberian kredit yang merupakan bukti perjanjian/ikatan hukum antara bank dengan nasabah kredit dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen-dokumen perkreditan lainnya yang merupakan perbuatan hukum atau mempunyai akibat hukum. Dokumentasi adalah kegiatan

yang meliputi pencatatan aktivitas keuangan dan pinjaman dalam koperasi. Dokumentasi diperlukan sebagai alat pemantauan perkiraan pinjaman dan bukti adanya transaksi. Menurut Atik Sukariyati (dalam wawancaranya tanggal 08-04-2015) menjelaskan bahwa:

“Dokumentasi berkaitan dengan bukti transaksi yang telah dilakukan koperasi dengan pihak lain baik itu peminjam atau pihak yang melakukan simpanan. Bukti ini penting sebagai dasar kami melakukan pencatatan, mengurangi kesalah pahaman dan sebagainya. Terdapat beberapa bukti transaksi atau dokumen yang kami berikan seperti halnya bukti penerimaan kas. Dokumen ini digunakan untuk mencatat kas yang kepada koperasi baik itu dari angsuran atau simpanan”

Dikoperasi Wetan kantor dokumen terdiri dari dua jenis yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Setiap transaksi akan dicatat pada pengeluaran kas jika ada transaksi pinjman sementara transaksi untuk penerimaan kas meliputi simpanan, angsuran dan sebagainya. Pemberian dokumen dalam setiap transaksi untuk menghindari adanya pencacatan ganda antara pihak koperasi dengan peminjam/penabung. Menurut Ibu Kapti jenis usaha adalah prancangan (wawancara tanggal 29-03-2015) mengtakan bahwa:

“saya setiap melakukan pinjaman atau tabungan selalu mendapatkan bukti transaksi dari koperasi Wetan kantor, hal ini mungkin untuk menandakan saya telah melakukan pembayaran”

Dokumen menunjukkan adanya sebuah transaksi, sebuah transaksi tak dianggap valid apabila tak memiliki bukti transaksi yang cukup jelas. Transaksi-transaksi keuangan yang terjadi direkam dalam suatu dokumen asli/sumber. Bukti transaksi tersebut menjadi bukti autentik terjadinya transaksi. Bukti transaksi tersebut antara lain terdiri dari faktur, nota, kuitansi dan cek. Setiap kali melakukan transaksi keuangan, harus membuat bukti tertulis sebagai tanda bukti yang sah, misalnya pada saat mengeluarkan uang, harus minta kuitansi dari penerimanya sebagai bukti bahwa uang tersebut telah betul-betul dikeluarkan. Hal ini perlu untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk mendapatkan suatu bukti transaksi yang kuat diperlukan tanda tangan dari pihak luar yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukannya. Bukti transaksi merupakan arsip yang penting bagi perusahaan.

Oleh karena itu, penyimpanannya harus tertib agar mudah dicari apabila dibutuhkan dan agar tidak mudah rusak.

4.3.8 Pelunasan Pinjaman

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pemberdayaan dalam bentuk pemberian pinjaman, tidak hanya terletak pada keputusan penerimaan dan pengeluaran uang saja, melainkan juga terletak pada perkembangan pelaku usaha yang telah dibantu dengan kredit dan lancarnya pengembalian pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam mengidentifikasi kredit, pihak pemberi kredit (koperasi) perlu menentukan parameter yang akan digunakan dalam penilaian kelayakan calon anggota maupun untuk mengevaluasi kemampuan membayar anggota yang sudah ada yaitu dengan menggunakan sistem penilaian kredit untuk sektor usaha kecil dan menengah. pengamatan terhadap profil debitur sangat diperlukan karena hal ini akan menjadi faktor lain yang dapat mendorong terjadinya kredit bermasalah. Menurut Ibu Soleha (dalam wawancaranya tanggal 27-03-2015) mengatakan bahwa:

“melihat apakah semuanya berjalan dengan lancar yaitu dengan melihat kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjamannya atau angsuran, ketepatan dalam mengembalikan pinjaman, tidak ada tunggakan serta tidak melebihi batas maksimal pelunasan”.

Menurut Ahmad Taufik (dalam wawancaranya tanggal 02-04-2015) menjelaskan mengenai masalah pelunasan peminjam seperti yang dikatakan bahwa:

“masalah dalam pelunasan peminjam sangat bervariasi, ada yang tepat waktu dan ada juga yang menunggak namun hasil akhir tetap membayar, pihak koperasi memang memiliki peraturan bahwa sebelum pinjaman awal dilunasi maka tidak diperbolehkan mengajukan pinjaman lagi, bahkan saya menyarankan agar setiap kali melakukan angsuran untuk bisa menabung atau menyimpan uangnya dikoperasi. Ada beberapa peminjam yang menunggak melakukan pelunasan hingga 2 tahunan, hal itu disebabkan karena peminjam pindah keluar kota dan tidak melunasi kewajibannya,

dengan masalah tersebut pihak Koperasi tetap berusaha memberikan informasi kepada peminjam untuk secepatnya membayar”.

Bantuan pinjaman modal sebagai upaya untuk mengembangkan usaha. Jika usaha dapat berkembang kemungkinan besar modal usaha juga bisa semakin besar. Perkembangan modal bisa terjadi jika pelaku usaha memiliki manajemen yang baik tentang pengelolaan uang. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha atas perkembangan modal pinjaman.

Ibu Sulasmina (Ketua Kelompok) Jenis Usaha adalah Laundry (wawancara tanggal 30-03-2015)

“paling saya melakukan pencairan itu sekarang ada kalau 50x saya lupa, ya saya pergunakan untuk pemula usaha laundry juga, uang dari koperasi saya pergunakan untuk menambahi buat beli mesin cuci itu kan mahal mbk, Alhamdulillah angsuran saya lancar meski terkadang terlambat ketika mengangsur”

Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa usaha laundry Ibu Sulasmina mengalami peningkatan jumlah modal usaha juga ditandai dengan kemampuan perkembangan yang luar biasa. Hal ini ditandai dengan proses pencairan pinjaman yang sudah dilakukan sebanyak 50 kali, dalam arti ini mengindikasikan bahwa ibu tidak mengalami masalah dalam proses pengembalian kredit pinjaman (lancar).

Ibu Misnaton jenis usaha aksesoris (souvenir) (wawancara tanggal 29-03-2015)

“kadang-kadang kalau pesanan souvenir lagi sepi, lagian kan musiman mbk, buat orang nikah itu, pas ada yang nawarin centering ya saya terima mbk kan lumayan buat nambah-nambah pemasukan bisa buat nyicil koperasi. Selama ini pernah memang telat dan nunggak tapi tetap saya lunasi semuanya”

Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa usaha ibu Misnaton tidak terlalu mengalami perkembangan modal. Sebab usaha ibu termasuk musiman, sehingga perkembangannya juga lambat karena nunggu musim dan juga pesanan orang. Namun setidaknya demikian ibu Misnaton pasti dapat untung atas penjualan tersebut.

Ibu Ifa (jenis usaha makan ringan) wawancara tanggal 30-03-2015

“ya Alhamdulillah saya bisa bertahan seperti saat ini, meski usaha kecil kayak gini ada masa surutnya tapi selalu bisa berjalan terus. Kadang kalau rame tiap harinya bisa dapat 200.000 itu bersih kotor ya kalau bersih anggap aja 50.000. untuk kemampuan mengembalikan pinjaman selama ini saya tidak ada masalah, saya selalu memperhatikan kapan saya harus menyetor”

Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa usaha ibu Ifa mengalami perkembangan. Sebab dengan kegiatan usaha tersebut ibu mendapatkan pemasukan dari usahanya.

Wawancara dengan ibu Legiwati pemilik kios (jualan rokok) tanggal (30-03-2015)

“lancar mbak....sekarang saya sudah ada kios perhari kadang-kadang saya bisa dapat hasil 100.000 sampai 125.000”

Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa usaha ibu Legiwati mengalami perkembangan yang luar biasa. Hal ini ditandai dengan adanya kios miliknya, serta mampu meningkatkan pendapatan setiap harinya.

Wawancara dengan ibu Khusnul selaku pengurus dan ibu RT di lingkungan wetan kantor (usaha sebagai penjahit), (dalam wawancaranya tanggal 29-03-2015) menjelaskan:

“Penghasilan saya dulu 150.000 sekarang 400.000 kalau jahitan sepi saya berkerja laennya, buat sampingan, tiap minggu saya jadi tukang parkir di alun2 juga. Untuk setoran keoperasi Alhamdulillah tidak ada maslah, kalau telat sih pernah mbak cuman tidak telat terus, kalau telat saya nyetornya langsung 2 setoran”

Pernyataan tersebut mengandung pengertian jika usaha Ibu Khusnul mengalami perkembangan yang luar biasa. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah pendapatannya.

Wawancara dengan ibu Mina beliu jenis usahanya mlijo (dalam wawancaranya tanggal 30-03-2015

“ saya dulu kan lama mlijo saya pinjem di koperasi ini cuman buat tambahan modal mlijo saya, pinjemnya sekitar 300.000 saya pinjem yang mingguan, penghasilannya saya gak mesti mbak, kadang bersihnya 75.000 kadang 100.000 juga pernah kalau pas rame 50.000 sengg sering, sekarang Alhamdulillah saya juga pernah pinjam 1000.000, tapi saya gak berani pinjem banyak lagi mbk.

Dari beberapa pemilik usaha mikro, adanya koperasi wanita sangat membantu untuk menambahkan modal atau untuk membuka usaha, mereka tidak memerlukan ketrampilan khusus karena pemilik usaha mikro bisa melakukan usahanya dengan cara-cara sederhana, yang mereka butuhkan adalah modal karena modal sangat penting untuk menambah kapasitas usahanya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mirfano Selaku Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember (dalam wawancaranya pada tanggal 11 maret 2015) menyatakan bahawa,

“ada yang berpendapat kemiskinan itu tidak disebabkan rendahnya SDM karena untuk meningkatkan SDM dibutuhkan dana dan orang miskin tidak mempunyai dana untuk itu jadi kemiskinan disebabkan oleh institusi, latar belakang lain begitu maraknya lentera praktiker lentera luar biasa orang kalau sudah terjebak lentera sulit untuk keluar”

Berikut rekapitulasi pinjaman dan pengembalian angsuran serta kemampuan dalam melakukan pinjaman.

Tabel 4.7 : Angsuran dan Simpanan Sukarela

No	Nama	Tgl Pinjam	Pinjaman	Angsuran Pokok	Jangka Waktu	Pelunasan	Simpanan
1	Misnatun	26/01/2014	1000.000	100.000	10 kali	10 kali	267.900
2	Kapti	26/01/2014	800.000	80.000	10 kali	10 kali	77.150
3	Mina	19/01/2014	1000.000	100.000	10 kali	10kali	24.250
4	Sulasminah	30/03/2014	900.000	90.000	10 kali	11 kali	97.000
5	Sumila	13/04/2014	700.000	70.000	10 kali	11 kali	93.250
6	Legiwati	13/04/2014	700.000	70.000	10 kali	10 kali	74.250
7	Sulastri	09/02/2014	800.000	80.000	10 kali	10 kali	55.250
8	Iva	30/11/2014	2.000.000	200.000	10 kali	10 kali	-
9	Siti Husnul	16/03/2014	500.000	50.00	10 kali	10 kali	71.250
10	Nurjiatin	26/01/2014	1200.000	120.000	10 kali	10 kali	110.500

Sumber : data primer diolah

4.4 Pembahasan

Tabel 4.8 Hasil Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Anggota Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember.

Kegiatan	Standart	Hasil	Analisis Data
Segmentasi Peminjam	a. Koperasi Wanita Wetan Kantor memberikan pinjaman pada bidang atau sektor usaha jasa. b. Koperasi Wanita Wetan Kantor memberikan pinjaman kepada perorangan (maupun kelompok) yang dapat dipergunakan untuk mendukung keperluan usaha dan non-usaha dari calon peminjam sepanjang calon peminjam mempunyai usaha atau memiliki sumber penghasilan untuk menjamin tersedianya sumber pendapatan untuk pembayaran pinjaman kembali	Pelaksanaan segmentasi peminjam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada SOP. koperasi memberikan pinjaman kepada oranag atau badan yang melakukan simpanan pokok, wajib dan sukarela di koperasi Wetan Kantor.	Beberapa peminjam tidak menggunakan dana pinjaman untuk usaha sebagian ada yang buat konsumsi maksud nya disini untuk kebutuhan pangan , bayar anak sekolah.
Tata Cara Permohonan Pinjaman	a. Mengisi Formulir Pemohonan dan Analisa Pinjaman dan melampirkan kelengkapan dokumen yang diperlukan yaitu Fotokopi KTP yang masih	Kegiatan permohonan pinjaman baru sesuai dengan SOP	Peminjam memenuhi semua persyaratan yang menjadi syarat pengajuan pinjaman dengan lengkap

	<p>berlaku. Memiliki simpanan pokok dan wajib di Koperasi bagi anggota.</p> <p>b. Membayar biaya administrasi 3% pada saat pencairan pembiayaan dari pinjaman yang dicairkan dan biaya-biaya langsung</p> <p>c. Pengurusan administrasi permohonan pinjaman tidak dapat diwakilkan oleh calon peminjam kepada pihak lain;</p>	<p>yang ada di Koperasi Wetan Kantor. Pencairan tidak bisa diwakilkan karena koperasi akan memberikan penjelasan terkait dengan pinjaman tersebut</p>	<p>baik untuk pengajuan baru, pinjaman ulang. Bagi yang melakukan pinjaman ulang seperti secara sistem bulanan, harus melunasi pinjaman sebelumnya. Setelah dilakukan survey baru kemudian diputuskan apakah ditolak atau disetujui pengajuannya.</p>
Limit Pinjaman	<p>Batasan maksimal pinjaman yang diberikan koperasi kepada peminjam tidak terbatas selama peminjam memiliki kemampuan dalam mengembalikan</p>	<p>Limit pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi dan kemampuan peminjam</p>	<p>Limit pinjaman ditentukan berdasarkan kebutuhan peminjam, jenis usahanya dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman. Selama ini pencairan pinjaman maksimal hanya 2.500.000.</p>
Biaya Pinjaman	<p>Biaya bunga 1.5% pinjaman dan biaya provisi/administrasi 3%</p>	<p>Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan</p>	<p>Biaya administrasi dipotong di awal pada saat pencairan pinjaman. Bunga dibayar tiap minggu, jumlah angsuran selama 10 minggu.</p>
Analisis pinjaman	<p>Kemampuan membayar dan Kemauan membayar</p>	<p>Analisis pinjaman dilakukan untuk memastikan bahwa</p>	<p>Analisis pinjaman tidak sepenuhnya dilakukan dengan baik, terkadang</p>

		peminjam memiliki kemampuan dan kemauan dalam membayar	tanpa ada analisis peminjam mendapatkan pencairan. Koperasi mempercayakan masalah analalisi pinjaman kepada ketua kelompok
Pembinaan pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberitahukan secara rutin posisi pinjaman; b. Memberikan teguran apabila terlambat membayar c. Membantu peminjam yang mengalami masalah di bidang usaha untuk jenis pinjaman produktif. 	Telah dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan	Setiap peminjam terlambat akan mendapatkan peringatan oleh koperasi, selalu menginformasikan jadwal jatuh tempo melalui SMS dan komunikasi lainnya
Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kas masuk b. Kas keluar c. Rekapitulasi pencairan dan pembayaran 	Terlaksana dengan baik sesuai dengan SOP	Setiap penerimaan dan pengeluaran Kas mendapatkan kuitansi, setiap akhir bulan laporan pinjaman dana pembayaran rekapitulasi oleh koperasi
Pelunasan Pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelunasan sesuai jadwal b. Pelunasan sebelum jatuh tempo 	Pelunasan pinjaman selama 10 kali angsuran	Beberapa anggota melakukan pelunasan hampir 12 kali angsuran, rata-rata anggota pernah nungguak melakukan pembayaran.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dilapangan peneliti dapat menyimpulkan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor, penelitian ini dilakukan dengan berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor yang terdiri dari :

1. Segmentasi Peminjam

Ini merupakan tahap awal yang perlu diperhatikan oleh Pengurus Koperasi Wanita Wetan Kantor, di dalam segmentasi pinjaman ada kriteria-kriteria untuk calon anggota atau peminjam, kriteria-kriteria tersebut untuk mengetahui apakah calon anggota layak atau tidak untuk memperoleh pinjaman yang ada di Koperasi Wanita Wetan Kantor, pelaksanaan segmentasi peminjaman tersebut sesuai dengan ketentuan Standart Operasional Prosedur (SOP) yaitu koperasi memberikan pinjaman kepada orang atau badan yang melakukan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan suka rela di koperasi wanita wetan kantor.

2. Tata Cara Permohonan Pinjaman

Pelaksanaan ini diawali dengan mengajukan permohonan pinjaman kepada bagian Unit Simpan pinjam, ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan petugas dan calon peminjam pada saat pengajuan dan pelayanan permohonan pinjaman, hal-hal tersebut sesuai yang tertulis pada Standart Operasional Prosedur (SOP) yang diantaranya pencairan tidak bisa diwakilkan karena pengurus koperasi akan memberikan penjelasan terkait dengan pinjaman tersebut.

3. Biaya Pinjaman

Dalam hal ini pelaksanaan biaya administrasi yang dikenakan kepada calon peminjam telah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yaitu biaya

administrasi di potong di awal pada saat pencairan pinjaman, selanjutnya peminjam melakukan angsuran pokok dan angsuran suka rela.

4. Analisis Pinjaman

Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko pinjaman yang macet, tetapi ada beberapa anggota yang sudah meminjam dia malah pergi keluar kota, mungkin karena sistem yang ada di Koperasi Wanita Wetan Kantor hanya sistem kepercayaan yang dilakukan, sehingga hal ini kadang terjadi, seharusnya dalam pelaksanaan Analisis pinjaman pihak Koperasi harus lebih berhati-hati dalam memilih calon anggota.

5. Pembinaan Terhadap Pinjaman

Pelaksanaan yang dilakukan pihak koperasi terhadap fasilitas pinjaman yang menyakut penilaian perkembangan usaha peminjam, pembinaan ini ada dua cara yaitu dengan cara administratif dan dengan cara di lapangan, hal ini sangat perlu di lakukan untuk pihak koperasi agar si anggota bisa berhati-hati juga dalam menerima calon anggota karena masih banyak calon anggota yang nakal.

6. Dokumentasi

Di Koperasi Wanita Wetan kantor ada dokumentasi terdiri dari dua jenis yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas, dokumen ini sangat penting untuk menunjukkan adanya sebuah transaksi bagi anggota koperasi dan pihak koperasi.

7. Pelunasan Pinjaman

Pada tahap pelaksanaan pelunasan pinjaman tidak berjalan lancar, karena dari beberapa tahapan-tahapan diatas tidak dijalankan sebagaimana mestinya, ada beberapa anggota yang nakal dan tidak menjalankan tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan akan tetapi pihak koperasi memberikan keringan kepada pihak-pihak yang mempunyai tanggungan tersebut.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang menjadi koreksi peneliti sesuai dengan fakta yang ditemui dilapangan adalah sebagai berikut:

1. pelatihan dan ketrampilan perlu untuk diberikan oleh pihak koperasi sehingga kegiatan yang dilakukan oleh anggota dapat difasilitasi oleh koperasi. Pelatihan penting untuk menunjang kegiatan usaha, dengan dibekali pelatihan dan ketrampilan maka pelaku usaha akan lebih kreatif dan terampil dalam mengembangkan usahanya. Kegiatan pelatihan ini bisa dilakukan sesuai dengan kegiatan usahanya.
2. Perlunya kerja sama pihak koperasi dengan beberapa pihak yang bersedia untuk memberikan fasilitas untuk pengembangan jaringan pada kegiatan usaha. Selama ini pelaku usaha cenderung membangun sendiri jaringan dalam memasarkan produknya. Kegiatan perluasan jaringan akan turut serta membantu pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan serta jumlah produksinya.
3. Pihak koperasi perlu mengkaji kembali dalam pemberian modal pinjaman kepada kelompok pelaku usaha mikro secara selektif agar penggunaan pinjaman tersebut diperuntukkan untuk kegiatan produktif sehingga modal pinjaman tersebut dapat berkembang dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari seperti tidak bisa mengembalikan pinjaman (kredit macet).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adi, I. R. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Rajawali Pers.

Badan Pusat Statistik (BPS), diakses dari <http://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 5 september 2014

Bappenas. 2004. *Indonesia : Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals)*. Jakarta : Bappenas-UNDP

Basuki, A. & Prasetyo, Y. E. 2007. *MeMusium-kan Kemiskinan*. Surakarta: PATTIRO Surakarta

Inayatullah & Mathur, Kuldeep. 1980. *Monitoring And Evaluation Of Rural Development:Some Asian Experiences*. Malaysia: City Press Sdn. Bhd.

Usman, H dan Akbar, PS. 2004. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi

Moleong, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mutrofin.2006. Pengantar Metodologi Riset Evaluasi (Kebijakan, Program dan Proyek) Yogyakarta: Laksbang Pressindo
Usman, H dan Akbar, PS. 2004. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Rudito, Bambang dan Budimanto, Arif 2003. *Metode dan Teknik Pengelolaan Comunity Development*

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Suryono, Agus dan Trilaksono Nugroho, 2008, *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*, Malang, Bayu Media

Soenarko, sd. H. 2000. *Public Policy*. Surabaya: Erlangga.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuaalitatif dan R & D*. Bandung: PT. Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuaalitatif dan R & D*. Bandung: PT. Alfabeta.

Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Surjono, A. dan Nugroho, T. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayu Media Publishing Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA-Unibraw.

Suyanto, B 1996. *Perangkap Kemiskinan: Problem dan strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Aditya Media.

Sulistiyani, A. T. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.

Tayipnapi, F .Y .2000 *Evaluasi Program Jakarta*. PT. Rinika cipta

Usman, H dan Akbar, PS. 2004. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Universitas Jember.2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Ketiga*. Jember:Jember University Press.

Yin, K.R. 1966. *Studi Kasus (Desain Dan Metode)*. Jakarta : Rajawali Press.

Dokumen dan Peraturan perundang-undangan

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Jember. 2010 *Petunjuk Teknis Pemberdayaan Keuangan Mikro Melalui Koperasi Wanita*

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jember 2009 *Akta Pendirian Koperasi “Koperasi Wanita Wetan Kantor”*

Koperasi Wanita Wetan Kantor Kelurahan Jember Lor *Tentang Standart Operasional Prosedur*

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Surat Keputusan

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 518/9961/103.2/2009 tanggal 09 Desember 2009 tentang pembentukan Koperasi Wanita Tingkat Kabupaten Kota

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jember Nomor 188.45/522 / 012 / 2009 Tentang Alokasi dana kelompok wanita desa atau kelurahan penerima belanja hibah bantuan modal kabupaten jember Tahun 2009

Surat Keputusan Menteri Nomor 351.1/KMK.010/2009, Menteri Dalam Negeri Nomor 900-693A Tahun 2009, Menteri Dalam Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11/43A/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.

Website

<http://www.sigana.web.id/index.php/kemiskinanabsolut.html>. pada tanggal 06 november 2014).

<http://www.yskk.org/berita/koperasi-wanita-solusi-bagi-kemandirian-perempuan-pengusaha-mikro.html/> pada tanggal 02-12-2014)

<http://smeru.or.id/report/fied/usahamikro2Buku%202%20Usaha20Mikro%20Edited.pdf> pada tanggal 05 Desember 2014) .

<http://www.fifensulistyyowati.blogspot.com/2013/07/pemberdayaan-perempuan.html?m=1>. pada tanggal 01 desember 2014).

